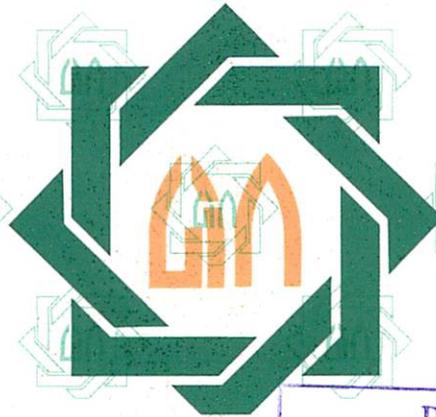


**STUDI PERBANDINGAN MANAJEMEN KURIKULUM DI
SEKOLAH INKLUSI ANTARA SMP NEGERI 29 SURABAYA
DAN SMP NEGERI 3 KRIAN SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Tarbiyah dan Keguruan**



PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K T-2016 006 K1	No. REG 7-2016/ki/006
Oleh:	ASAL B:
	TANGGAL :

Perdana Nur Rachma Permata

D03212054

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : **PERDANA NUR RACHMA PERMATA**

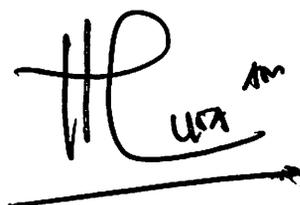
NIM : **D03212054**

Judul : **STUDI PERBANDINGAN MANAJEMEN KURIKULUM DI
SEKOLAH INKLUSI ANTARA SMP NEGERI 29 SURABAYA
DAN SMP NEGERI 3 KRIAN SIDOARJO**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 29 September 2016

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'HP' followed by 'USA' and a small 'Am' above it. A horizontal line with an arrowhead at the right end is drawn below the signature.

Dra. Muhlishah, A.M., M.Pd
NIP. 19680505199403001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Oleh Perdana Nur Rachma Permata ini telah dipertahankan di depan Tim
Penguji Skripsi
Surabaya, Selasa 11 Oktober 2016
Mengesahkan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag
NIP.196311161989031003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA
NIP.195208121980031006

Penguji II,

Dr. Hj. Husnivatus Salamah Z, M.Ag
NIP.196903211994032003

Penguji III,

Dra. Mukhlisah AM, M.Pd
NIP.196805051994032001

Penguji IV,

Ali Mustofa, M.Pd
NIP.197612252005011008

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Perdana Nur Rachma Permata

NIM : D03212054

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Jurusan : Kependidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasilkarya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 29 September 2016

Yang membuat pernyataan



Perdana Nur Rachma Permata
NIM. D03212054

ABSTRAK

Perdana Nur Rachma Permata, NIM: D03212054, Tahun 2016, Judul Skripsi, “Studi Perbandingan Manajemen Kurikulum Di Sekolah Inklusi Antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo”.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Manajemen Kurikulum Di Sekolah Inklusi Antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo” adalah: 1) Bagaimana manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya; 2) Bagaimana manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian; 3) Adakah perbedaan dan persamaan manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian.

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian sebab sesuai dengan syarat penelitian dalam kasus perbandingan, sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian harus mempunyai status Akreditasi yang sama, dimana kedua sekolah ini memiliki status Akreditasi “A”.

Tujuan penelitian ini adalah dapat mengetahui manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi. Sehingga bisa digeneralisasikan sistem manajemennya untuk sekolah berbasis inklusi yang lain.

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan ini karena data yang dikaji dan dihasilkan adalah deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, display data serta kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya baik bagi peserta didik reguler ataupun bagi PDBK didalamnya terdapat proses kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang baik dan sesuai dengan hambatan, potensi dan kebutuhan peserta didik. 2) manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian bagi peserta didik reguler berjalan sesuai dengan SOP K13 berbeda dengan manajemen kurikulum bagi PDBK yang didalamnya kurang terdapat proses kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang khusus dan sesuai dengan hambatan, potensi dan kebutuhan PDBK. 3) terdapat perbedaan dalam hal kurikulum inklusi bagi PDBK, penyusunan program ajaran, pengelolaan program kelas bagi PDBK, fasilitas serta sarpras bagi PDBK dan dalam hal evaluasi terhadap KBM bagi PDBK. Namun terdapat pula persamaan dari kedua sekolah berbasis inklusi tersebut yakni penggunaan kurikulum 2013 bagi peserta didik regulernya, prosedur identifikasi hambatan, potensi serta kebutuhan PDBK dan Pembuatan tim pendidikan khusus (TPK) oleh kepala sekolah.

Kata Kunci: Manajemen Kurikulum sekolah inklusi, SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
HALAMAN JUDUL	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Definisi Operasional	9
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : LANDASAN TEORI	
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
A. Manajemen Kurikulum	16
1. Konsep	16
2. Definisi Manajemen Kurikulum	17
3. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum	21
4. Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum	22
5. Komponen-Komponen Manajemen Kurikulum	27
B. Manajemen Kurikulum di Sekolah Inklusi	35
1. Manajemen Kurikulum Bagi Peserta Didik Reguler di Sekolah Inklusi	35
2. Manajemen Kurikulum Bagi PDBK di Sekolah Inklusi	42
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	81
B. Lokasi Penelitian	83
C. Informan Penelitian	83

D. Teknik Pengumpulan Data	85
1. Metode Observasi (pengamatan)	86
2. Metode <i>Interview</i> (wawancara)	87
3. Metode Dokumentasi	88
E. Teknik Analisa Data	89
1. Reduksi Data	89
2. <i>Display</i> Data	90
3. Kesimpulan dan Verifikasi	91
BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA	
A. Penyajian Data	92
1. Manajemen kurikulum di Sekolah berbasis Inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya	92
2. Manajemen kurikulum di Sekolah berbasis Inklusi di SMP Negeri 3 Krian.....	104
3. Perbedaan dan Persamaan Manajemen Kurikulum di Sekolah Berbasis Inklusi Antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian.....	112
B. Analisa Data	116
1. Manajemen kurikulum di Sekolah berbasis Inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya	116
2. Manajemen kurikulum di Sekolah berbasis Inklusi di SMP Negeri 3 Krian.....	125
3. Perbedaan dan Persamaan Manajemen Kurikulum di Sekolah Berbasis Inklusi Antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian	130
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Struktur Kurikulum SMP	38
Tabel 2.2 : Penyesuaian Tujuan	50
Tabel 2.3 : Penyesuaian Isi	51
Tabel 2.4 : Penyesuaian Proses	52
Tabel 2.5 : Penyesuaian Evaluasi	53
Tabel 2.6 : Program Kebutuhan Khusus PDBK di Kelas Inklusi	57
Tabel 2.7 : Program Kebutuhan Khusus PDBK di Kelas Khusus	65
Tabel 2.8 : Struktur Organisasi TPK Bagi PDBK di Sekolah Inklusi	71

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).¹ Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat merasa memiliki sekolah. Sehingga terbentuk sinergis antara sekolah dengan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat membantu dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran,

¹ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 23.

menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah².

Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Tita Lestari mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap³ :

1. *Tahap perencanaan*; meliputi langkah-langkah sebagai : (1) analisis kebutuhan; (2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis; (3) menentukan desain kurikulum; dan (4) membuat rencana induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.
2. *Tahap pengembangan*; meliputi langkah-langkah : (1) perumusan rasional atau dasar pemikiran; (2) perumusan visi, misi, dan tujuan; (3) penentuan struktur dan isi program; (4) pemilihan dan pengorganisasian materi; (5) pengorganisasian kegiatan pembelajaran; (6) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar; dan (7) penentuan cara mengukur hasil belajar.
3. *Tahap implementasi atau pelaksanaan*; meliputi langkah-langkah: (1) penyusunan rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); (2) penjabaran materi (kedalaman dan keluasan); (3) penentuan strategi dan metode pembelajaran; (4) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran; (5) penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar; dan (6) setting lingkungan pembelajaran

² Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*.....,40.

³ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta : Rineka cipta, 1997), 41.

4. *Tahap penilaian*; terutama dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup Konteks, input, proses, produk (CIPP): Penilaian konteks: memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan peluang. Penilaian Input: memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi design dan cost benefit dari rancangan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian product berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program (identik dengan evaluasi sumatif).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar sarana dan prasaranan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.⁴ Melalui kerja keras selama 2006, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan telah berhasil mengembangkan kurikulum khusus bagi ABK dengan hambatan pengelihatnan, pendengaran, daksa/ fiksi, dan penyimpangan perilaku. Akan tetapi kurikulum

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

khusus yaitu SLB dan SDLB, sedangkan untuk sekolah inklusi BSNP belum dapat mengembangkannya.⁵

Penulis turut mencermati perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia yang sudah menampakkan signifikan, tetapi masih membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Dewasa ini peran lembaga pendidikan sangat menunjang pertumbuhan anak dalam memperoleh sistem atau cara bergaul dengan orang lain. Selain itu, lembaga pendidikan tidak hanya sebagai wahana untuk sistem bekal ilmu pengetahuan. Namun juga sebagai lembaga yang mendapat memberikan *skill* atau bekal untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Begitu juga dengan keberadaan pendidikan inklusi yang harus diperjuangkan oleh pihak yang peduli terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus tanpa terkecuali sehingga mereka bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan yang layak.

Saat ini kurikulum yang digunakan di kelas Inklusi adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara: (1) Modifikasi alokasi waktu, (2) Modifikasi isi/materi, (3) Modifikasi proses belajar-mengajar, (4) Modifikasi sarana-prasarana, (5) Modifikasi lingkungan belajar, dan (6) Modifikasi pengelolaan kelas.⁶

Manajemen Kurikulum (program pengajaran) Sekolah Inklusi antara lain meliputi: (1) Modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan

⁵ Abdul Salim dan Munawir Yusuf, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusi*, (Surakarta: FKIP Universitas 11 Maret, 2009), 5.

⁶ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus Suatu Pengantar Dalam Pendidikan Inklusi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 21.

awal dan karakteristik siswa (anak luar biasa); (2) Menjabarkan kalender pendidikan; (3) Menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar; (4) Mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran persemester dan persiapan pelajaran; (5) Mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler; (6) Mengatur pelaksanaan penilaian; (7) Mengatur pelaksanaan kenaikan kelas; (8) Membuat laporan kemajuan belajar siswa; (9) Mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran.⁷

Arif Sadiman dalam tulisannya yang berjudul "Kurikulum Berbasis Inklusi di Madrasah (landasan teori dan desain pembelajaran prospektif islam)" menuliskan bahwa keberbedaan peserta didik baik secara jasmani dan rohani (mental) tidak dipandang sesuatu yang didiskriminasikan, yang selama ini mereka hanya di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun "tembok eksklusifisme" bagi peserta didik berkebutuhan khusus, eksklusifisme ini telah menghambat proses saling mengenal antar peserta didik difabel dengan peserta didik non-difabel. Dengan keterlibatan pendidikan regular (sekolah pada umumnya) dengan penyatuan (*inclusion*) maka akan membuka eksklusifisme menuju inklusiisme, membangun kembali mental psikologi bagi peserta didik berkebutuhan khusus, atau program inklusi, yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik termasuk

⁷ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus*23.

yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di kelas reguler tanpa perbedaan.⁸

Mengingat jumlah anak berkebutuhan khusus tidak sedikit yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, maka sudah semestinya para pengelola pendidikan mulai memberikan perhatian lebih terhadap program sekolah inklusi yang tepat beserta kurikulumnya. Jika tidak itu sama halnya dengan merampas hak-hak mereka, bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa "Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah". Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi.⁹

Dengan hadirnya pendidikan inklusi maka hak-hak anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu senantiasa akan terkabul dan memberikan hal positif bagi anak berkebutuhan khusus untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi dewasa yang mandiri dan cerdas.

⁸ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus*,24.

⁹ Abdul Salim dan Munawir Yusuf, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusi*,6.

SMP Negeri 29 dan SMP Negeri 3 Krian menjadi sekolah yang dipilih dalam melakukan penelitian ini. Sebab sesuai dengan syarat penelitian dalam kasus perbandingan, sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian harus mempunyai status Akreditasi yang sama, dan dalam hal akreditasi SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian telah memenuhi persyaratan tersebut. Dimana kedua sekolah tersebut memiliki status Akreditasi “A”. Dan sekolah ini pun sama-sama telah ditunjuk untuk oleh Dinas setempat untuk menjadi sekolah inklusi dimana dalam proses pembelajarannya selain terdapat peserta didik reguler juga terdapat peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan diketahui Manajemen Kurikulum di sekolah inklusi mana yang lebih efektif, dan efisien dalam menangani peserta didik baik yang reguler ataupun PDBK di sekolah berbasis inklusi. Sehingga bisa digeneralisasikan sistem manajemennya untuk sekolah berbasis inklusi yang lain.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “***Studi Perbandingan Manajemen Kurikulum di Sekolah Inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo***”.

B. Rumusan Masalah

Setiap pelaksanaan penelitian pada dasarnya dimulai dari sesuatu yang dianggap sebagai permasalahan yang perlu dicari jawabannya. Adapun dalam penelitian ini, permasalahan- permasalahan yang dapat diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen kurikulum di sekolah inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya?
2. Bagaimana manajemen kurikulum di sekolah inklusif di SMP Negeri 3 Krian?
3. Adakah perbedaan dan persamaan manajemen kurikulum di sekolah inklusif antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen kurikulum di sekolah inklusif di SMP Negeri 29 Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen kurikulum di sekolah inklusif di SMP Negeri 3 Krian.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan manajemen kurikulum di sekolah inklusif antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung di dalam skripsi ini, maka diperlukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Sekolah dengan Kurikulum Inklusi

Pendidikan inklusif di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 2003. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.66/MN/2003 bahwa disetiap Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia sekurang-kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusif, yaitu dijenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah.¹⁰ Sampai akhir tahun 2006 telah dirintis sebanyak 775 sekolah inklusif di Indonesia dengan perincian sebanyak 573 sekolah jenjang SD, 101 sekolah jenjang SMP dan 101 sekolah jenjang SMA.¹¹ Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sekarang telah memiliki landasan yuridis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70, Tahun 2009.¹²

Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada Standar Nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. UU 20/2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada

¹⁰ Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif.

¹¹ Abdul Salim, Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan, Vol 16, 22.

¹² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70, Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.

KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.¹³

Dalam konteks sekolah inklusif maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak hanya satu macam, karena keberadaan ABK di sekolah tersebut.¹⁴ Artinya, disamping ada KTSP yang dikembangkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SI dan SKL, juga mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) atau IEP (*Individualized Educational Program*) yang dikembangkan mengacu pada kurikulum khusus yang memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar yang masih harus dikembangkan.¹⁵

2. Kurikulum di Sekolah Inklusi di SMPN 29 Surabaya

Kurikulum di sekolah inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya ini tidak luput dari: 1) Analisis mata pelajaran (AMP), 2) Kalender Akademik, 3) penyusunan Program tahunan (PROTA), 4) penyusunan Program semester (PROMES), 5) Proram satuan pelajaran, dan 6) rencana pengajaran. Untuk melayani pendidikan ABK maka perencanaan kurikulum atau pengajaran harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan individual

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

¹⁴ Abdul Salim, Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan, Vol 16, 25.

¹⁵ Abdul Salim, Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan, Vol 16, 25.

penanganan yang tidak dapat disamakan dalam setiap individunya. Maka agar ABK dapat tetap mengikuti proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, guru pembimbing khusus dari SMP Negeri 29 Surabaya mengatakan bahwa pihak sekolah merencanakan pemilihan kurikulum pembelajaran baik untuk peserta didik reguler ataupun PDBK tersebut dengan menelaah assesment yang dimiliki orang tua wali murid ABK baik itu dari Dokter, Rumah Sakit, surat keterangan dari Dinas, ataupun dari sekolah dijenjang sebelumnya PDBK tersebut berasal sebelum siswa masuk atau diterima di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya. Dengan mengidentifikasi assesment tersebut dan proses wawancara guna mengetahui riwayat ABK maka pihak sekolah dapat mengetahui kurikulum dan menyesuaikan pola ajar, bahan ajar, materi ajar, strategi dan metode ajar yang tepat dalam menangani PDBK itu sendiri.¹⁶

3. Kurikulum Inklusi di SMPN 3 Krian Sidoarjo

Kurikulum di sekolah inklusi di SMP Negeri 3 Krian tidak luput dari hal-hal sebagai berikut: 1) Analisis mata pelajaran (AMP), 2) Kalender Akademik, 3) penyusunan Program tahunan (PROTA), 4) penyusunan Program semester (PROMES), 5) Proram satuan pelajaran, dan 6) rencana pengajaran. Sekolah inklusi di SMP Negeri 3 Krian dalam merencanakan kurikulum ajarnya baik untuk peserta didik reguler ataupun PDBK yang ditambah juga berdasarkan *assesment* atau riwayat ketunaan yang dimiliki

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Nela selaku GPK SMP Negeri 29, Selasa 14 Juli 2016, pukul. 10.30.

PDBK itu sendiri yang telah disetujui oleh Dinas dan kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.¹⁷

Peneliti mengangkat kedua sekolah tersebut menjadi tempat penelitian karena selain kedua sekolah tersebut memiliki status akreditasi sekolah yang sama yakni “A” juga menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Dinas pendidikan setempat untuk menjadi sekolah inklusi, yang tidak hanya menerima anak reguler namun juga anak berkebutuhan khusus (ABK) di wilayah setempat. Sehingga bisa digeneralisasikan sistem manajemennya untuk sekolah inklusi yang lain.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Heby Yuda Pratama dengan judul “Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Inklusi (Studi Kasus di SMK Negeri 2 Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen kurikulum dan pembelajaran inklusi yang ada di SMK Negeri 2 Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kegiatan perencanaan kurikulum dilakukan sebelum awal tahun ajaran baru, kegiatan tersebut meliputi menyusun

¹⁷ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30.

kurikulum yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kurikulum. Pengembangan kurikulum inklusi dengan cara modifikasi, substitusi ataupun omisi kurikulum, kalender pendidikan dirancang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang ditulis oleh Halimul Fatah jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul “Implementasi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Unggulan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang”. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Penerapan manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 3 Malang itu melalui beberapa tahapan, yaitu: 1). Perencanaan 2). Pengorganisasian 3). Pelaksanaan 4). Evaluasi dalam bentuk sumatif dan formatif.

Penelitian yang berjudul “Manajemen Kurikulum 2013 di SMP Khadijah Surabaya”. Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Syarifatus Tadzkiroh pada tahun 2015. Penelitian ini ditulis dengan tujuan: 1. Mengetahui praktek-operasional manajemen kurikulum 2013 di SMP Khadijah Surabaya 2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kurikulum 2013 di SMP Khadijah Surabaya.

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang Manajemen Kurikulum. Akan tetapi dari penelitian-penelitian tersebut tidak ditemukan adanya Studi Perbandingan perbandingan antara Manajemen Kurikulum antara beberapa sekolah Inklusi sebagaimana

permasalahan yang hendak diteliti. Sehingga penelitian yang berjudul “Manajemen Kurikulum di sekolah Berbasis Inklusi Antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMPN 3 Krian (Studi Perbandingan)” ini dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan diungkapkan hasil penelitian skripsi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian secara eksplisit dan sistematis. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini berisi Pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan dari hasil penelitian itu sendiri.

Bab II : Bab ini mengemukakan Kajian Teori tentang manajemen kurikulum dan manajemen kurikulum di sekolah inklusi. Pada bab kedua ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yang terdiri dari definisi manajemen kurikulum, ruang lingkup, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, komponenen kurikulum, macam-macam dan jenis PDBK, serta menjelaskan manajemen kurikulum baik bagi peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK di sekolah inklusi.

Bab III : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang mencakup; jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisa data

Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang Penyajian Data Dan Teknik Analisa Data yang meliputi; penyajian data yang terdiri dari: penyajian data tentang bagaimana manajemen kurikulum sekolah inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya, bagaimana manajemen kurikulum sekolah inklusi di SMP Negeri 3 Krian, dan Perbedaan serta persamaan manajemen kurikulum inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian. Analisa data yang menjelaskan tentang Manajemen kurikulum sekolah Inklusi dengan teori dan yang ada di lapangan serta membandingkan persamaan dan perbedaan manajemen kurikulum di sekolah inklusi.

Bab V : Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan yang merupakan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Manajemen Kurikulum

1. Konsep Kurikulum

Ada tiga konsep tentang kurikulum, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.¹ Konsep pertama, kurikulum sebagai suatu substansi, suatu kurikulum, dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga dapat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mencakup lingkup tertentu, suatu sekolah, suatu kabupaten, propinsi, ataupun seluruh negara.²

Konsep kedua, adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 27.

² *Ibid.*, 27.

menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.³

Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.⁴

2. Definisi Manajemen Kurikulum

Menurut Sergiovanni dan kawan-kawan yang terdapat dalam buku Ibrahim Bafadhal, mengatakan bahwa manajemen sebagai *process of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently* (manajemen sebagai proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien).⁵ Selain itu dalam manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Stoner, seperti yang dikutip Fachruddin mendefinisikan manajemen sebagai suatu

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, 27.

⁴ Ibid., 27.

⁵ Maman Ukas, *Manajemen: Konsep, Prinsip, dan aplikasi*, (Bandung: Ossa Promo, 1999), 27.

proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Gordon dalam *Bafadal*, menyatakan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu.⁶

Dari ketiga definisi manajemen menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen yakni suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Sedangkan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁷ Menurut Saylor, Alexander, dan Lewis kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah. Sementara itu, Harold B. Albery memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (*all of activities that are provided for the students by the school*). Bagi J. Lloyd Trump dan Delmas F. Miller dalam buku "*Secondary School curriculum*

⁶ Maman Ukas, *Manajemen: Konsep, Prinsip, dan aplikasi*,..... 29-30.

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. (Bandung: Refika Aditama, 2012), 23.

Improvement”, kurikulum itu lebih luas dari pada bahan pelajaran. Menurut mereka dalam kurikulum juga termasuk metode belajar dan mengajar, cara mengevaluasi kemajuan murid dan seluruh program, perubahan dalam tenaga pengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah ruangan, ruang serta kemungkinan adanya pilihan mata pelajaran. Ketiga aspek pokok, yakni program, manusia dan struktur sangat erat hubungannya sehingga tak mungkin diadakan perbaikan kalau tidak diperhatikan ketiganya.⁸ Dari beberapa definisi kurikulum tersebut penulis menyimpulkan bahwa kurikulum adalah serangkaian program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa agar memperoleh hasil belajar yang efektif efisien dan hasil yang sesuai dengan tujuan sekolah.

Setelah mengetahui beberapa definisi mengenai manajemen dan kurikulum, agar lebih jelasnya maka bisalah kita dapat lebih mengerti dan menelaah lagi mengenai keabsahan definisi manajemen kurikulum itu sendiri. Manajemen kurikulum menurut Franks dan Kast dalam Perriton adalah: “...*make the school over in its own traditional image, instead of being thoroughly vocational and practical, with courses and programs designed to help managers*”. Yaitu membuat kelebihan (plus) isi pada madrasah/ satuan pendidikan, sebagai idaman (keunggulan) dan bahkan pengembangan itu sepenuhnya ditekankan pada kecakapan dan keahlian dalam praktek, apakah dengan latihan; atau kursus dan program kegiatan

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*,... 24.

yang dirancang untuk membantu pemimpin atau kepala madrasah/ satuan pendidikan.⁹

Menurut penalaran diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen

kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, dan sistemtik dalam rangka mewujudkan ketercapaian kurikulum. Dalam pelaksanaanya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).¹⁰ Oleh karena itu, otonomi yang diberikan lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat merasa memiliki sekolah. Sehingga terbentuk sinerjik antara sekolah dengan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah.¹¹ Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat membantu dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum,

⁹ Abdul Manab, *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah*, (Jakarta: Kalimedia, 2013), 83.

¹⁰ Ibid., 84.

¹¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka cipta, 1991), 136.

mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.¹²

3. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Studi manajemen kurikulum adalah bagian integral dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan umumnya dibidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan tentu telah mengenal, bahwa studi tentang pengembangan kurikulum merupakan suatu cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengandung ruang lingkup yang sangat luas. Studi ini bukan saja mencakup kegiatan mempelajari dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan. Disamping itu meliputi studi yang mendalam tentang bidang-bidang: perencanaan kurikulum, manajemen kurikulum, evaluasi dan riset kurikulum.¹³

Pokok kegiatan utama studi manajemen kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, dan perbaikan kurikulum¹⁴.

- a. Manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum berdasarkan asumsi bahwa: telah tersedia informasi dan data tentang masalah-masalah dan kebutuhan yang mendasari disusun perencanaan yang tepat.

¹² Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Bina Aksara: Jakarta, 1988), 84.

¹³ Abdul Manab, *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah*,.... 84-85.

¹⁴ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*,.... 98.

b. Manajemen pelaksanaan kurikulum berdasarkan asumsi bahwa kurikulum telah direncanakan sebelumnya dan siap dioperasikan.

c. Manajemen perbaikan berdasarkan asumsi, bahwa perbaikan, kurikulum sekolah perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan mutu pendidikan.

d. Evaluasi kurikulum berdasarkan asumsi, bahwa perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan kurikulum membutuhkan informasi balikan yang akurat. Dengan demikian jelaslah, bahwa perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengadministrasian, evaluasi dan perbaikan kurikulum bergerak dalam suatu sistem dalam siklus yang berkesinambungan, dalam lingkungan proses sistem pendidikan menyeluruh.

4. Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum

Prinsip dan fungsi kurikulum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah beberapa hal sebagai berikut, yaitu¹⁵:

a. Prinsip Manajemen Kurikulum

1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran manajemen kurikulum.

¹⁵ Abdul Manab, *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah*,.... 85.

- 2) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus beraskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- 4) Efektifitas dan Efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.
- 5) Mengarahkan Visi, Misi, dan Tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.¹⁶

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum.¹⁷ Kilpatrick menawarkan tiga prinsip utama dalam suatu kurikulum. Pertama, harus mampu meningkatkan kualitas anak didik pada setiap jenjang sekolah. Kedua, harus menjadikan

¹⁶ Abdul Manab, *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah*,.... 87.

¹⁷ Nana Sujana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar baru, 1991), 27.

kehidupan aktual anak ke arah perkembangan dalam satu kehidupan yang integral. Ketiga, mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai sebuah uji coba atas keberhasilan sekolah sehingga anak didik mampu berkembang dalam mengembangkan potensi pribadinya.¹⁸

b. Beberapa Fungsi dari Manajemen Kurikulum di antaranya :

H. Siagian mengungkapkan pandangan dari beberapa fungsi, yaitu:¹⁹

- 1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- 2) Meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kulikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.²⁰

¹⁸ Nana Sujana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, 27.

¹⁹ Oemar Hamalik, *pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Mandar maju, 1990), 80.

²⁰ Oemar Hamalik, *pengembangan Kurikulum*,81.

- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.²¹

Menurut G.R. Terry dalam bukunya yang berjudul *Implementasi*

Manajemen Kurikulum Pendidikan terdapat empat fungsi manajemen kurikulum:²²

- 1) Perencanaan (*Plannning*), adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap

²¹ Ibid., 81.

²² <http://K3311020.blogspot.co.id/2013/05/makalah-manajemen-kurikulum.html?m=1>, diakses 27 Juli 2016.

kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. T. Hani Handoko mengemukakan sembilan manfaat

perencanaan bahwa perencanaan

- a) Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan
- b) Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama
- c) Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran
- d) Membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat
- e) Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi
- f) Memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai bagian organisasi
- g) Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami
- h) Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti
- i) Menghemat waktu, usaha, dan dana.

perencanaan bahwa perencanaan

- 2) Pengorganisasian (*organizing*), George R. Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, dan memperoleh kepuasan

pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.²³

3) Pelaksanaan (*actuating*), dari seluruh rangkaian proses manajemen,

pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama.

Fungsi ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.²⁴

4) Pengawasan (*controlling*), merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai pengawasan.²⁵

5. Komponen-komponen Manajemen Kurikulum

Dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah 1975/1976 dikenal Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki komponen komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni: (1). Tujuan, (2). Materi, (3). Metode, (4). Evaluasi. Komponen-komponen tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran.²⁶

a. Tujuan Kurikulum

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat

²³ Abdullah, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 94.

²⁴ Ibid., 95.

²⁵ Ibid., 95-96.

²⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 90.

kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat.

Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-

citakan.²⁷ Misalkan, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat

Indonesia ialah Pancasila, maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh

suatu kurikulum adalah membentuk masyarakat yang pancasilais.

Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan

misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap

mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Tujuan kurikulum

menurut Sudjana, pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program

pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik.²⁸

Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan

pendidikan, maka Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi, dari

tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus yang bersifat

spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi.

Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat²⁹.

1) Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)

Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) adalah tujuan yang bersifat

paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman

oleh setiap usaha pendidikan, artinya setiap lembaga dan

penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai

rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggara oleh lembaga

²⁷ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum,* 92-93

²⁸ Abdul Manab, *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah,* 85.

²⁹ Ibid., 85-86.

pendidikan formal, informal, maupun non formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dari filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang.

TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas Tujuan Pendidikan Nasional yang bersumber dari sistem nilai pancasila dirumuskan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 3, bahwa pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab³⁰.

2) Tujuan Instusional (TI)

Tujuan Instusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kulifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di suatu lembaga tertentu. Tujuan Instusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan oleh jenjang

³⁰ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*,95.

pendidikan seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi.³¹

3) Tujuan Kurikuler (TK)

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Oleh sebab itu tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan.³²

4) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam sekaali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran disuatu lembaga pendidikan, maka menjabarkan tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru. Sebelum guru melakukan proses belajar mengajar (PBM), guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Menurut Bloom, dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives* yang terbit tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan

³¹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*,96.

³² *Ibid.*,. 96.

kedalam tiga klasifikasi atau tiga domain (bagian), yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor.³³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
b. Isi/ Materi Kurikulum

Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut.³⁴

Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum.³⁵ dalam Undang-undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa "Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional" (Bab IX, Ps. 39). Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut³⁶:

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, ... 103.

³⁴ Abdul Manab, *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah*,87.

³⁵ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 25.

³⁶ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*,..... 25.

- 1) Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran,
- 2) Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut,
- 3) Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan terget tertinggi yang hendak dicapai memlalui penyampaian materi kurikulum.

c. Metode

Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.³⁷ Suatu metode mengandung pengertian terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Metode dilaksanakan melalui prosedur tertentu. Dewasa ini, keaktifan siswa belajar mendapat tekanan utama dibandingkan dengan keaktifan siswa yang bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswa. Karena itu, istilah metode yang lebih menekankan pada kegiatan guru, selanjutnya diganti dengan istilah strategi pembelajaran yang menekankan pada kegiatan siswa.

³⁷ Ibid., 26.

Metode atau strategi pembelajaran menempati fungsi yang penting dalam kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa dan guru.³⁸ Karena itu, penyusunan hendaknya berdasarkan analisa tugas yang mengacu pada tujuan kurikulum dan berdasarkan perilaku awal siswa. Dalam hubungan ini, ada tiga alternatif pendekatan yang digunakan, yakni³⁹:

- 1) Pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran, dimana materi pembelajaran terutama bersumber dari mata pelajaran. Penyampiannya dilakukan melalui komunikasi antara guru dan siswa. Guru sebagai penyampai pesan atau komunikator. Siswa sebagai penerima pesan. Bahan pelajaran adalah pesan itu sendiri. Dalam rangkaian komunikasi tersebut dapat digunakan berbagai metode mengajar
- 2) Pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, minat dan kemampuan siswa. Dalam pendekatan ini lebih banyak digunakan metode dalam rangka individualisasi pembelajaran. Seperti belajar mandiri, belajar modulan, paket belajar dan sebagainya.
- 3) Pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan sekolah dan masyarakat dan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Prosedur yang ditempuh adalah dengan mengundang masyarakat atau siswa

³⁸ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*,26-27.

³⁹ *Ibid.*, 27.

berkunjung ke masyarakat. Metode yang digunakan terdiri dari: karyawisata, nara sumber, kerja pengalaman, survei, proyek pengabdian/pelayanan masyarakat, berkemah dan unit.⁴⁰

d. Evaluasi

Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Proses tersebut meliputi perencanaan implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut maka dalam konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Melalui evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan.⁴¹

Evaluasi merupakan komponen-komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan.⁴² Dalam konteks kurikulum evaluasi itu dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum, atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif yang bermaksud menilai kemajuan siswa setelah satu semester atau dalam periode tertentu, untuk mengetahui perkembangan siswa secara

⁴⁰ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*,.... 27.

⁴¹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 73.

⁴² *Ibid.*, 74.

menyeluruh.⁴³ Dan evaluasi sebagai fungsi formatif dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan siswa dan dalam upaya melakukan perbaikan yang dibutuhkan.⁴⁴

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penilaian, ialah validitas, reliabilitas, objektivitas, kepraktisan, pembedaan, syarat-syarat ini dijelaskan lebih lanjut pada bab evaluasi belajar dan pembelajaran.⁴⁵

Disamping itu perlu diperhatikan bahwa: 1). Penilaian harus bersifat objektif, dan dilakukan berdasarkan tanggung jawab kelompok guru, rencana yang rinci dan terkait dengan pelaksanaan kurikulum, sesuai dengan tujuan dan materi kurikulum, menggunakan alat ukur yang handal dan mudah dilaksanakan serta memberikan hasil yang akurat.⁴⁶

B. Manajemen Kurikulum Di Sekolah Inklusi

1. Manajemen Kurikulum Bagi Peserta Didik Reguler Di Sekolah

Inklusi

Pemerintah (kemendikbud) telah merevitalisasi kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter (*competency and character*) atau lebih dikenal dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan

⁴³ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*,.... 28.

⁴⁴ Dedn J, *Managing the Primari School*, Second Edition, (London: Knowledge, 1985), 102.

⁴⁵ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*,.... 29.

⁴⁶ Ibid., 29.

tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang pernah dirintis pada tahun 2004 untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Landasan Konseptual

- a) Relevansi pendidikan (*link and match*).
- b) Kurikulum berbasis kompetensi, dan karakter.
- c) Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*).
- d) Pembelajaran aktif (*student active learning*).
- e) Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh.

a. Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.⁴⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
- 2) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan

⁴⁷ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, 63.

⁴⁸ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.

3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.

4) Adanya buku guru dan buku siswa yang disediakan oleh pemerintah.

5) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

6) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.

7) Kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.

8) Kompetensi Dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

9) Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan/sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan penerapan pengetahuan/keterampilan (KI-4). Keempat kelompok itu menjadi

acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (KI-3) dan penerapan pengetahuan (KI-4).

b. Struktur Kurikulum 2013 SMP

Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas:

- 1) Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik disatu-satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan.
- 2) Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka.

Adapun Struktur Kurikulum SMP/MTs adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum SMP⁴⁹

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1	Seni Budaya dan Keterampilan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan	3	3	3

⁴⁹ Kurikulum 2013 SD/MI dalam <http://www.pendidikan-diy.go.id/kurikulum-2013-kompetensi-dasar-SMP>. (17 Oktober 2016).

	Kesehatan (termasuk muatan lokal)			
3	Prakarya (termasuk muatan lokal)	2	2	2
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		38	38	38

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a) Keterangan:

- Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah, ekstrakurikuler SMP antara lain: Pramuka, Osis, UKS, PMR
- Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor.
- Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran Kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- Sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per- minggu untuk tiap mata pelajaran adalah relatif. Guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.
- Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) **Beban Belajar:**

Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester. Beban belajar di SMP untuk masing-masing kelas VII, VIII dan IX adalah 38, 38, 38. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP adalah 40 menit.⁵⁰

c. **Proses Manajemen Kurikulum 2013**

Manajemen kurikulum 2013 adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi implementasi kurikulum pendidikan dalam upaya untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan, visi, misi, dan tujuan pendidikan di sekolah. Berikut penjelasannya:

1) **Perencanaan implementasi kurikulum.**

Kepala sekolah melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah dan para guru menyusun kurikulum 2013 dan perangkat kelengkapannya. Proses penyusunan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Perangkat yang disusun meliputi: pengaturan beban belajar, PROTA, PROMES, kalender pendidikan, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP

⁵⁰ Kurikulum 2013 SD/MI dalam <http://www.pendidikan-diy.go.id/kurikulum-2013-kompetensi-dasar-SD>.

pada setiap mata pelajaran, jadwal tugas guru serta fasilitas dan bahan ajar yang akan digunakan.

2) Pelaksanaan kurikulum

Pelaksanaan kurikulum mencakup antara lain pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan berbagai komponen terkait. Kepala sekolah harus memantau dan mengarahkan para guru dan karyawan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pengelolaan komponen sekolah harus dilaksanakan dengan baik, antara lain presentasi kehadiran, arsip/dokumen, sistem informasi, penanganan siswa, data penilaian hasil belajar, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan implementasi kurikulum.

3) Pengawasan

Kepala sekolah bertanggung jawab atas semua aktivitas pendidikan di sekolah. Kepala sekolah perlu memantau apakah setiap guru dan karyawannya telah melaksanakan tugas yang sesuai dengan jadwalnya dengan baik. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka harus segera mungkin mencari solusinya dan kepala sekolah mampu memberikan saran konstruktif kepada guru agar pembelajaran lebih bermutu.

4) Evaluasi

Untuk mengetahui apakah kurikulum telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan maka pelaksanaan evaluasi mencakup antara lain: kelengkapan perangkat

pembelajaran, dukungan fasilitas, proses pembelajaran, kinerja guru dan karyawan, hasil atau prestasi belajar siswa, dan hal yang

terkait lainnya

2. Manajemen Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi

Mutu pendidikan (lulusan) sangat di pengaruhi oleh mutu proses belajar mengajar, sementara itu mutu proses belajar mengajar ditentukan oleh berbagai faktor (komponen) yang saling terkait satu sama lain salah satunya adalah kurikulum.⁵¹

Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, maka pendidikan khusus harus dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional 2013. Salah satu perubahan kurikulum pendidikan khusus 2013 adalah perubahan paradigma, bahwa semua peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya

dilayani kebutuhannya melalui sekolah khusus (SLB), akan tetapi juga terbuka luas bagi mereka untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler secara inklusi. Pemerintah melalui Kemendikbud RI telah menetapkan bahwa bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang mengikuti pendidikan inklusi di sekolah reguler, perlu disediakan dua program pilihan yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya kelainan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus. Bagi PDBK tingkat

⁵¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*,..... 136.

ringan, mengikuti program pendidikan di kelas inklusi, sedangkan bagi PDBK tingkat berat mengikuti program pendidikan di kelas khusus.⁵²

Berikut adalah hal-hal yang terdapat dalam manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi:

a. Prosedur dan Tahapan

Prosedur dan tahapan yang dilalui satuan pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan bagi PDBK di sekolah inklusi, yaitu:

1) Pembentukan Tim Pendidikan Khusus⁵³

Sekolah inklusi membentuk satu Tim Pendidikan Khusus (TPK) secara permanen yang beranggotakan guru kelas/ guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, guru bimbingan konseling, psikolog, tenaga medis, dan/atau tenaga terapi terkait lainnya. Jika di satu daerah tidak ada akses untuk tenaga profesi tertentu seperti psikolog dan tenaga medis, sekolah untuk membentuk TPK dengan keanggotaan tenaga yang tersedia. Tim ini bertugas mengkoordinasikan penyediaan layanan bagi PDBK, dari tahap penerimaan, identifikasi, asesmen, penempatan program, pendampingan, monitoring, evaluasi, supervisi dan tindak lanjut. Secara berkala, tim harus bertemu untuk melihat perkembangan

⁵² Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi, (Jakarta: Kemendikbud RI, 2014), i.

⁵³ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 17.

PDBK secara individual dan menempatkan tindak lanjut dari hasil pemantauan tersebut.

2) Penerimaan peserta didik⁵⁴

Peserta didik pada sekolah inklusi dapat berstatus sebagai PDBK sejak awal karena sudah diketahui bahwa peserta didik tersebut berkebutuhan khusus , atau baru ditemukan/diketahui setelah terdaftar sebagai peserta didik berdasarkan pengamatan guru selama mengikuti pendidikan. Baik PDBK yang sejak awal diketahui berkebutuhan khusus maupun yang baru ditemukan/diketahui di sekolah, diperlukan data tentang riwayat perkembangan anak semua aspek yang ada, misalnya kartu sehat, prestasi belajar sebelumnya, informasi tentang perilaku anak dari orangtua, teman sebaya, atau guru yang mengajar dari sekolah sebelumnya.

3) Identifikasi

Identifikasi bertujuan untuk menemukenali peserta didik yang dapat digolongkan sebagai PDBK. Proses identifikasi dilakukan TPK dengan menggunakan instrumen identifikasi yang terlampir.⁵⁵

4) Asessmen

Asessmen merupakan tindak lanjut dari identifikasi yang bertujuan untuk memastikan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK dari berbagai aspek, seperti potensi intelektual,

⁵⁴ Ibid.,..... 18.

⁵⁵ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 18.

akademik, fisik/kesehatan (penglihatan, pendengaran, motorik), kondisi emosi/sosial/perilaku), tenaga medis (untuk kondisi kesehatan, kemampuan visual, auditif, motorik), dan pedagog (untuk kemampuan akademik). Hasil asesmen dicatat dalam lembar laporan hasil asesmen PDBK, sebagai bahan pertimbangan TPK untuk pilihan penempatan program bagi PDBK.

5) Penempatan di kelas

Berdasarkan hasil asesmen, TPK mengadakan sidang kasus (*case conference*) yang melibatkan kepala sekolah, guru dan orang tua untuk memutuskan pilihan penempatan jenis layanan yang tepat bagi PDBK, yaitu di kelas inklusi atau di kelas khusus, dan program-program dukungan yang diperlukan.

6) Pendampingan

TPK melakukan pendampingan kepada PDBK dalam mengikuti kegiatan pembelajaran baik pada kelas inklusi dan kelas khusus untuk mengetahui tingkat kemajuan pembelajaran yang sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khususnya.

7) Monitoring, evaluasi, dan supervisi

Selama layanan pendidikan berlangsung, TPK memantau, mengevaluasi dan mensupervisi secara berkala untuk melihat efektivitas program layanan. Peremuan TPK perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan untuk menghasilkan rekomendasi tentang kelanjutan layanan bagi setiap PDBK, baik

jenis program, intersitas layanan, dan kebutuhan tenaga yang terlibat.

Bahan yang perlu dibahas dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan

supervisi antara lain dokumen pencapaian kemajuan belajar

(akademik dan non-akademik) PDBK.⁵⁶

8) Tindak lanjut⁵⁷

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan supervisi TPK menindaklanjuti dalam bentuk antara lain:

- a) Melakukan revisi program layanan
- b) Melanjutkan program layanan yang belum terselesaikan
- c) Pemindahan pilihan program layanan dari kelas khusus ke kelas inklusi dan/atau sebaliknya.⁵⁸

b. Pilihan Jenis Program Bagi PDBK di Sekolah Inklusi

Berdasarkan rapat TPK setelah mengkaji hasil identifikasi dan assesmen, seorang PDBK di sekolah inklusi dapat ditempatkan di kelas inklusi atau dikelas khusus.⁵⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Kelas Inklusi

Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang dipertimbangkan untuk ditempatkan dalam kelas inklusi adalah tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan gangguan kesehatan, tunalaras, kesulitan belajar spesifik, lamban belajar, autis yang tidak disertai dengan hambatan intelektual, perilaku dan komunikasi

⁵⁶ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,.....19.

⁵⁷ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,.....20.

⁵⁸ Ibid., 20.

⁵⁹ Ibid., 27-28.

signifikan. Jumlah PDBK dalam suatu kelas inklusi (satu rombongan belajar) tidak dibatasi, tergantung pada kompleksitas hambatan PDBK dan ketersediaan sumberdaya sekolah. Jenis guru yang melayani kelas inklusi terdiri atas:

a) guru reguler (guru kelas atau guru mata pelajaran) yang mengajar di kelas inklusi yang telah memiliki kriteria sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki sikap dan kepedulian yang positif terhadap PDBK dan pendidikan inklusi, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar tentang layanan pendidikan untuk PDBK yang dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan diri/profesi. Guru reguler memiliki tugas pokok dan fungsi: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran dan, melakukan tindak lanjut (remedial/pengayaan);⁶⁰

b) GPK (guru pendidikan khusus) memiliki tugas dan fungsi pokok: 1. melakukan identifikasi dan asesmen PDBK; 2. membantu guru reguler dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pembelajaran pada PDBK; 3. memberikan layanan program kebutuhan khusus bagi PDBK sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khususnya; 4. memberi layanan informasi dan konsultasi kepada guru, kepala

⁶⁰ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 27.

sekolah, staf sekolah, orangtua dan pihak-pihak terkait tentang layanan pendidikan untuk PDBK; 5. membuat perangkat administrasi kesiswaan dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar PDBK yang terlampir.⁶¹

Kurikulum pendidikan inklusi bagi PDBK menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) sebagaimana yang dimaksud mencakup elemen standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), matapelajaran, kompetensi dasar (KD), indikator keberhasilan, silabus, RPP, buku teks, buku pedoman guru. Diluar kurikulum reguler PDBK mendapatkan program tambahan berupa program Kebutuhan Khusus yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya⁶². Dalam implementasi atau pelaksanaannya, penyesuaian atau Modifikasi kurikulum dapat dilakukan dengan cara:

- Modifikasi alokasi waktu

Disesuaikan dengan mengacu pada kecepatan belajar siswa. Yang diselenggarakan diluar jam sekolah dengan alokasi waktu setara dengan 4 jam untuk SD dan SMP serta 2 jam untuk SMA.

⁶¹ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 28.

⁶² *Mengenal Pendidikan Inklusi*, (www.ditplb.or.id, diakses 22 Agustus 2016).

- Modifikasi Isi/materi

Disesuaikan dengan kemampuan siswa, jika intelegensi anak diatas normal, materi dapat diperluas atau ditambah materi baru. Jika intelegensi anak relatif normal, materi dapat tetap dipertahankan. Jika intelegensi anak dibawah normal materi dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitan seperlunya, atau bahkan dihilangkan bagian tertentu.

- Modifikasi Proses Belajar-Mengajar

Yakni: a) menggunakan pendekatan *Student Central*, yang menekankan perbedaan individu setiap anak, b) Lebih terbuka (*divergent*), c) Memberikan kesempatan mobilitas tinggi, karena kemampuan siswa didalam kelas heterogen, d) Menerapkan pendekatan pembelajaran kompetitif seimbang dengan pendekatan pembelajaran kooperatif, e) Disesuaikan dengan tipe belajar siswa.

- Modifikasi Sarana dan Prasarana

Dalam hal ini terdapat kaulifikasi didalamnya yaitu: a) Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di atas normal maka perlu disediakan laboratorium, alat praktikum dan sumber belajar lainnya yang memadai, b) Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi relatif normal, dapat menggunakan sarana prasarana seperti anak normal, c) Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di

bawah normal, maka perlu tambahan sarana prasarana khusus yang lebih banyak, terutama untuk memvisualisasikan hal-hal

yang abstrak agar menjadi lebih konkrit.⁶³

- **Modifikasi Lingkungan Belajar**

Diupayakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan Ada sudut baca (perpustakaan kelas).

- **Modifikasi Pengelolaan Kelas**

Pengelolaan kelas hendaknya fleksibel, yang memungkinkan mudah dilaksanakannya pembelajaran kompetitif (individual), pembelajaran kooperatif (kelompok/berpasangan), dan pembelajaran klasikal.⁶⁴

- **Penyesuaian evaluasi,**

Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan dan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁵

Berikut ditunjukkan beberapa contoh proses penyesuaian

kurikulum pada 4 aspek utama kurikulum, untuk masing-masing jenis PDBK:

Tabel 2.2
Penyesuaian Tujuan

Hambatan	Aspek yang perlu di sesuaikan	Contoh penyesuaian
Tunanetra	Kompetensi yang membutuhkan aktivitas	• Kompetensi melukis

⁶³ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusi*,25.

⁶⁴ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusi*,25.

⁶⁵ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,.....29.

	visual seperti kemampuan melukis, seni pertunjukan, olahraga, eksperimen kimia, kompetensi terkait dengan warna dll.	diganti dengan seni relief atau seni suara. <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi bermain basket. Peserta didik tunanetra mungkin hanya dituntut untuk menguasai drable atau kekuatan melempar bola. Atau diganti dengan kompetensi ranah kognitif terkait basket, misalnya memahami sejarah basket, aturan bermain basket dll.
Tunarungu	Kompetensi yang melibatkan pendengaran dan suara	<ul style="list-style-type: none"> • Target kompetensi bernyanyi diganti dengan kompetensi seni gerak (pantonim)
Tunadaksa	Kompetensi yang menuntut aktivitas gerak dan mobilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Target kompetensi ranah motorik diganti dengan ranah kognitif. Lebih diarahkan kepada kemampuan yang bersifat memahami, menganalisis dan merancang seni, olahraga, dll.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Taber 2.3
Penyesuaian Isi⁶⁶

Hambatan	Aspek yang Perlu Disesuaikan	Contoh Penyesuaian
Tunanetra	Materi pelajaran yang menuntut aktivitas visual dan gerak	<ul style="list-style-type: none"> • Materi seni rupa diganti dengan seni suara • Materi ketrampilan bermain bulu tangkis diganti dengan materi tentang sejarah dan aturan main bulu tangkis
Tunarungu	Materi pelajaran yang menuntut pendengaran dan bahasa verbal	<ul style="list-style-type: none"> • Materi/pelajaran seni suara diganti dengan seni lukis atau seni gerak.

⁶⁶ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 30.

		<ul style="list-style-type: none"> • Materi baca puisi diganti dengan materi menulis puisi.
Tunadaksa	Materi pelajaran yang menuntut aktivitas gerak dan mobilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Materi bermain basket diganti dengan materi sejarah dan atau olahraga basket.

Tabel 2.4
Penyesuaian Proses⁶⁷

Hambatan	Aspek yang Perlu Disesuaikan	Contoh Penyesuaian
Tunanetra	Cara menyajikan materi atau informasi, cara melakukan suatu tugas/aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari penggunaan kata-kata abstrak seperti ini, itu, disana dll. Sebaiknya langsung sebut namanya atau tempatnya • Penggunaan media tactual, seperti globe, peta timbul, penggaris timbul dll. • Penggunaan objek asli atau benda tiruan yang bisa diraba sebagai media dalam pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan alat baca-tulis Braille. • Penggunaan komputer bicara dalam belajar • Modifikasi cara permainan sepak bola, catur, tenis meja, lari dll.
Tunarungu	Cara menyajikan materi atau informasi dalam pembelajaran. Cara berkomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hindari berbicara sambil membelakangi peserta didik • Gerakan bibir harus jelas, wajah saling bertatapan dalam jarak yang dekat, penggunaan

⁶⁷ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 31.

		alat bantu dengar <ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian bahasa isyarat atau komunikasi total.
Tunadaksa	Cara penyajian materi pelajaran, cara melkukan suatu tugas/ aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi informasi/computer dalam pembelajaran • Adaptasi alat untuk memudahkan peserta didik bergerak dan belajar • Modifikasi cara permainan olahraga

Tabel 2.5
Penyesuaian Evaluasi⁶⁸

Hambatan	Aspek yang Perlu Disesuaikan	Contoh Penyesuaian
Tunanetra	Isi, cara dan alat evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Soal evaluasi disajikan dalam tulisan Braille • Soal yang berkaitan dengan kemampuan visual motorik diganti dengan soal yang mengukur kemampuan kognitif atau verbal
Tunarungu	Isi dan cara evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Soal disajikan dalam kalimat yang pendek dan lugas, disertai dengan ilustrasi (gambar, grafik, dll.) • Tes mendengar (<i>listening tes</i>) diganti dengan tes membaca pemahaman
Tunadaksa	Isi, cara dan alat evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan media computer untuk memudahkan pelaksanaan tes • Soal tes yang terkait dengan gerak dan mobilitas diganti dengan soal tes yang mengukur

⁶⁸ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 32.

		kemampuan kognitif.
--	--	---------------------

c. Tahapan Manajemen Kurikulum Bagi PDBK di Sekolah Inklusi

Pada Program Kelas Inklusi

Setelah mengetahui komponen-komponen yang ada pada kelas inklusi seperti yang telah dijelaskan diatas maka aktivitas manajemen kurikulum bagi PDBK di sekolah inklusi pada program kelas inklusi meliputi:

1) Perencanaan⁶⁹

Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefektif mungkin. Dalam hal ini terdapat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yakni rencana pembelajaran yang dibuat untuk satu atau beberapa kali pertemuan dalam satu mata pelajaran tertentu.

RPP merupakan penjabaran lebih rinci dan operasional dari

silabus. RPP sekurang-kurangnya mencakup 5 komponen utama yaitu (1) rumusan/tujuan kompetensi yang akan dicapai, (2) materi yang akan diajarkan, (3) proses atau kegiatan yang akan dilaksanakan, (4) media dan sumber yang digunakan, dan (5) evaluasi untuk mengetahui keberhasilan. RPP dikelas inklusi bersifat klasikal, artinya dibuat dan diperuntukan bagi semua peserta didik secara bersama, baik PDBK maupun peserta didik

⁶⁹ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 33.

umum. Oleh karena itu, RPP di kelas inklusi pada dasarnya sama dengan RPP yang umum (reguler), baik berkaitan dengan elemen yang terkandung di dalamnya, struktur, maupun cara pengembangannya.

Untuk memwadhahi pengaturan pelaksanaan pembelajaran bagi PDBK, maka perlu dibuatkan catatan tambahan pada RPP umum yang dibuat oleh guru, yang ditulis pada setiap komponen RPP umum yang dianggap memerlukan penyesuaian bagi PDBK tertentu.

2) Pengorganisasian/ Pengelolaan⁷⁰

Dalam hal ini guru melakukan pengelolaan kelas, hal ini merupakan upaya guru untuk menata lingkungan, situasi kelas dan berbagai perlengkapan yang ada di dalamnya sehingga membuat PDBK merasa mudah, nyaman dan aman serta kondusif terhadap terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.

Ruang kelas inklusi harus ditata dengan memperhatikan karakteristik PDBK, penataan ruang dan peralatan kelas juga memperhatikan aspek keamanan PDBK PDBK. Kursi dan meja dibuat dari bahan yang kuat, ringan dan bersifat moveable. Formasi tempat duduk peserta didik dapat dibuat secara bergantian (bervariasi) sesuai kebutuhan. Beberapa formasi tempat duduk yang dapat dipilih diantaranya adalah: formasi tempat duduk

⁷⁰ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 34.

berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, tapal kuda, bentuk U, kelompok-kelompok kecil (*cluster*) atau bentuk tradisional yakni berbaris kebelakang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam pengorganisasian atau pengelolaan yang ada pada kelas inklusi PDBK harus ditempatkan pada tempat duduk yang dekat dengan guru, supaya memudahkan dalam berkomunikasi, mendeteksi kesulitan dan memberikan bantuan. PDBK disarankan duduk sebangku atau berdekatan dengan peserta didik yang tidak mengalami hambatan, supaya ada kesempatan untuk saling belajar dan membantu.⁷¹

3) Pelaksanaan⁷²

Proses pembelajaran adalah cara, prosedur, atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan guru seta elemen lainnya supaya peserta didik dapat menguasai kompetensi secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru di kelas inklusi harus memenuhi dua kepentingan yaitu PDBK dan peserta didik lainnya. Artinya, metode atau strategi yang dikembangkan harus efektif bagi keduanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pembelajaran di kelas inklusi menggunakan pendekatan *scientific*, dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengamati (*observing*), menanya atau merumuskan masalah (*questioning*), dan melakukan percobaan (*experimenting*) atau pengamatan lanjutan,

⁷¹ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 35.

⁷² Ibid., 35.

menghubung-hubungkan fenomena (*associating*), dan mengkomunikasikan hasil (*communicating*). Implementasi pendekatan pembelajaran scientific berlaku juga bagi PDBK di kelas inklusi. Pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK.

Mengenai alat, media dan sumber belajar pada hakekatnya baik yang ada pada sekolah reguler dapat dipergunakan pula dalam pembelajaran dikelas inklusi. Penyesuaian atau modifikasi dapat dilakukan bagi PDBK tertentu oleh Guru agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan keberagaman peserta didik.

Pada pelaksanaannya PDBK juga mendapatkan program kebutuhan khusus, yaitu program khusus PDBK agar dapat menjalankan fungsi kehidupan secara optimal. jenis program kebutuhan khusus berbeda-beda untuk setiap PDBK. bergantung pada jenis hambatannya. Berikut gambaran tentang program kebutuhan khusus untuk masing-masing kategori PDBK:

Tabel 2.6
Program Kebutuhan Khusus untuk Masing-masing
Kategori PDBK⁷³

Jenis Hambatan	Program Kebutuhan Khusus
Tunanetra	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kemampuan baca tulis Braille • Pengembangan kemampuan orientasi dan mobilitas.
Tunarungu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi

⁷³ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 41.

	dan irama
Tunadaksa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan gerak • Pengembangan kemampuan bina diri
Autis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku
Tunalaras	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pribadi dan sosial

Program kebutuhan khusus dilaksanakan diluar jam belajar, sebelum jam sekolah dimulai, atau setelah jam sekolah, atau memanfaatkan waktu luang yang tersedia.

4) Evaluasi/ Penilaian⁷⁴

Berdasarkan pada ketentuan umum bahwa PDBK yang ada kelas inklusi menggunakan kurikulum yang sama dengan peserta didik lainnya, maka penilaian dilaksanakan dengan pedoman sebagai berikut: (1) semua mata pelajaran dan program kebutuhan khusus PDBK dikelas inklusi dilakukan penilaian secara autentik mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan, (2) Dalam beberapa kondisi, pelaksanaan penilaian untuk PDBK dikelas inklusi harus mengalami modifikasi, supaya pelaksanaan penilaian dapat mengukur secara obyektif hasil belajar PDBK dan berlangsung adil (*fair*) sesuai dengan kondisi yang ada pada PDBK.

Berikut disajikan beberapa petunjuk umum pelaksanaan modifikasi penilaian bagi PDBK di kelas inklusi, terkait dengan 5 aspek utama yaitu:⁷⁵

⁷⁴ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 42-43.

⁷⁵ Ibid., 43.

a) Isi

Isi atau materi soal-soal penilaian yang diujikan kepada PDBK pada dasarnya sama dengan soal-soal yang digunakan oleh peserta didik lainnya. Materi ujian yang bersifat kognitif yang biasa diujikan melalui ujian tulis, umumnya juga bisa diberlakukan sama kepada PDBK. dalam kondisi tertentu, dimungkinkan PDBK mengikuti su tansi ujian yang berbeda.

b) Cara

Modifikasi dalam cara pelaksanaan penilaian bagi PDBK dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, hambatan, kebutuhan khusus PDBK, sehingga proses penilaian mudah diakses oleh PDBK.

c) Alat

Beberapa PDBK memerlukan peralatan khusus untuk mendukung kemudahan dan kelangsungan penilaian. Diantaranya peralatan baca tulis Braille bagi tunanetra, alat bantu pembesar tulisan (*loop/magnifier*) bagi PDBK kurang lihat (*low-vision*)

d) Pelaporan Hasil Belajar

Buku laporan hasil belajar (rapor) untuk PDBK dikelas inkusif mengikuti cara dan ketentuan umum, hanya saja ada beberapa catatan yang perlu ditambahkan yakni mengenai

informasi pencapaian hasil belajar secara naratif-deskriptif yang terlampir.

5) Kenaikan kelas, kelulusan, ijazah dan studi lanjut⁷⁶

- a) Kenaikan kelas, kelulusan dan perolehan ijazah untuk PDBK di kelas inklusi mengikuti prosedur atau ketentuan umum.
- b) PDBK yang telah menyelesaikan pendidikan di sebuah satuan pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- c) Sekolah memiliki kewajiban untuk membantu memfasilitasi PDBK yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

2) Kelas khusus⁷⁷

Peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang dipertimbangkan untuk ditempatkan dalam Kelas khusus adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan gangguan kesehatan autis, disabilitas majemuk yang disertai hambatan secara signifikan pada aspek intelektual, perilaku, dan komunikasi diasumsikan tidak mampu mengikuti kurikulum reguler. Penempatan peserta didik dikelas khusus didasarkan atas hasil asesmen. Jumlah PDBK dalam satu rombongan belajar di kelas khusus tidak dibatasi, tergantung pada kompleksitas hambatan PDBK dan ketersediaan sumberdaya sekolah berbasis inklusi.

⁷⁶ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 46.

⁷⁷ Ibid.,. 47.

Guru yang mengajar di kelas khusus adalah Guru Pendidikan Khusus (GPK) dan Guru matapelajaran. GPK adalah guru yang memenuhi klasifikasi dan kompetensi pendidikan khusus (PLB), disediakan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jumlah guru GPK yang wajib disediakan sekolah berbasis inklusi yang menyelenggarakan kelas khusus, menggunakan rasio GPK:PDBK = 1:5 (1 GPK maksimal untuk melayani 5 PDBK di kelas khusus).⁷⁸

GPK sebagai guru kelas di Kelas Khusus memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: (1) bersama dengan TPK melakukan penyesuaian kurikulum reguler bagi PDBK, (2) merencanakan, melaksanakan, menilai dan melakukan dindakan lanjut hasil pembelajaran matapelajaran yang diampu, (3) menyelenggarakan administrasi pembelajaran dan kesiswaan, (4) berkolaborasi dengan guru reguler, orangtua PDBK, dan pihak-pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan sekolah berbasis inklusi, (5) menyusun laporan proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan. Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, GPK bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran progra Pendidikan Kebutuhan Khusus sesuai dengan jenis kelainan PDBK. Program

⁷⁸ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 47.

kekhususan tambahan diperlukan dalam kurikulum yaitu orientasi mobilitas bagi tunanetra, pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama bagi tunarungu, pengembangan diri bagi tunagrahita, pengembangan diri dan gerak bagi tunadaksa, pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku bagi autisme, atau pengembangan pribadi dan sosial bagi tunalaras.

Kurikulum yang digunakan PDBK pada kelas khusus yakni kurikulum reguler yang diadaptasi disesuaikan dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK. sebagaimana dimaksud mencakup elemen standar kompetensi lulusan (SKL), kompetensi inti (KI), matapelajaran, kompetensi dasar (KD), indikator keberhasilan, silabus, RPP, buku teks, buku pedoman guru. Implementasi penyesuaian kurikulum reguler dilakukan oleh TKP di sekolah berbasis inklusi. Di kelas khusus PDBK mendapatkan Program kebutuhan khusus, dengan alokasi waktu setara dengan 4 jam pelajaran untuk SMP, dan disediakan program tambahan pendidikan vokasional untuk memberikan pembekalan kemandirian bagi PDBK.⁷⁹

Mengenai tahapan manajemen kurikulum bagi PDBK di sekolah inklusi pada kelas khusus antara lain meliputi.⁸⁰

⁷⁹ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 49.

⁸⁰ Ibid., 50.

a) Perencanaan

Rencana pembelajaran di kelas khusus dapat berbentuk rencana pembelajaran klasikal atau individual, sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK. rencana pembelajaran individual adalah rencana pembelajaran yang dirancang dan diberlakukan untuk seorang peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, yang didasarkan kepada hasil asesmen. Rencana pembelajaran individual sekurang-kurangnya memuat elemen-elemen pokok sebagai berikut: 1) identitas matapelajaran atau bidang ketrampilan yang akan diajarkan, 2) identitas peserta didik, 3) kondisi kemampuan peserta didik saat ini, 4) tujuan pembelajaran, 5) indikator keberhasilan, 6) materi, 7) kegiatan pembelajaran, 8) media dan sumber belajar, 9) evaluasi

b) Pengorganisasian/ Pengelolaan⁸¹

Dalam hal ini guru melakukan pengelolaan kelas, hal ini merupakan upaya guru untuk menata lingkungan, situasi kelas dan berbagai perlengkapan yang ada di dalamnya sehingga membuat PDBK merasa mudah, nyaman dan aman serta kondusif terhadap terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.

⁸¹ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 51.

Ruang kelas khusus harus ditata dengan memperhatikan karakteristik PDBK, penataan ruang dan peralatan kelas juga memperhatikan aspek keamanan PDBK. Kursi dan meja dibuat dari bahan yang kuat, ringan dan bersifat moveable. Formasi tempat duduk peserta didik dapat dibuat secara bergantian (bervariasi) sesuai kebutuhan. Beberapa formasi tempat duduk yang dapat dipilih diantaranya adalah: formasi tempat duduk berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, tapal kuda, bentuk U.

c) Pelaksanaan⁸²

Proses pembelajaran adalah cara, prosedur, atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan guru serta elemen lainnya supaya peserta didik dapat menguasai kompetensi secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru di kelas khusus harus memenuhi dua kepentingan yaitu PDBK dan peserta didik lainnya. Artinya, metode atau strategi yang dikembangkan harus efektif bagi keduanya.

Pembelajaran di kelas inklusi menggunakan pendekatan *scientific*, dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengamati (*observing*), menanya atau merumuskan masalah (*questioning*), dan melakukan percobaan

⁸² Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 52.

(*experimenting*) atau pengamatan lanjutan, menghubungkan-hubungkan fenomena (*associating*), dan mengkomunikasikan hasil (*communicating*). Implementasi pendekatan pembelajaran scientific berlaku juga bagi PDBK di kelas inklusi. Pelaksanaanya disesuaikan dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK.

Mengenai alat, media dan sumber belajar pada hakekatnya baik yang ada pada sekolah reguler dapat dipergunakan pula dalam pembelajaran dikelas khusus. Penyesuaian atau modifikasi dapat dilakukan bagi PDBK tertentu oleh Guru agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan keberagaman peserta didik.

Pada pelaksanaanya PDBK juga mendapatkan program kebutuhan khusus, yaitu program khusus PDBK agar dapat menjalankan fungsi kehidupan secara optimal. jenis program kebutuhan khusus berbeda-beda untuk setiap PDBK. bergantung pada jenis hambatannya. Berikut gambaran tentang program kebutuhan khusus untuk masing-masing kategori PDBK:

Tabel 2.7
Program Kebutuhan Khusus untuk Masing-masing
Kategori PDBK⁸³

Jenis Hambatan	Program Kebutuhan Khusus
Tunanetra	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kemampuan baca tulis Braille • Pengembangan kemampuan orientasi dan mobilitas.
Tunarungu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama
Tunadaksa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan gerak • Pengembangan kemampuan bina diri
Autis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku
Tunalaras	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pribadi dan sosial

Program kebutuhan khusus dilaksanakan diluar jam belajar, sebelum jam sekolah dimulai, atau setelah jam sekolah, atau memanfaatkan waktu luang yang tersedia.

Pendidikan vokasional merupakan hal penting yang harus mendapatkan prioritas di kelas khusus karena hal ini terkait dengan upaya untuk membimbing anak ke arah kemandirian di masyarakat. Arah dan konten pendidikan vokasional berbeda pada setiap tingkat pendidikan, di SMP lebih diarahkan kepada ketrampilan pra-kerja. PDBK dibekali dengan ketrampilan sebagai landasan yang diperlukan untuk bekerja serta memiliki alokasi waktu 4 jam.

⁸³ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 59.

Pelaksanaan pendidikan vokasional di kelas khusus dapat dijalankan melalui 3 strategi/ cara, yaitu: 1) dilaksanakan tersendiri di kelas khusus atau ruang workshop oleh guru ketrampilan, 2) dilaksanakan secara terintegrasi (bergabung) dengan peserta didik lainnya, 3) dilaksanakan diluar sekolah yaitu di perusahaan, industri, badan latihan kerja dll.

d) Evaluasi/ Penilaian⁸⁴

Berdasarkan pada ketentuan umum bahwa PDBK yang ada kelas inklusi menggunakan kurikulum yang sama dengan peserta didik lainnya, maka penilaian dilaksanakan dengan pedoman sebagai berikut: (1) semua mata pelajaran dan program kebutuhan khusus PDBK dikelas inklusi dilakukan penilaian secara autentik mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan, (2) Dalam beberapa kondisi, pelaksanaan penilaian untuk PDBK dikelas inklusi harus mengalami modifikasi, supaya pelaksanaan penilaian dapat mengukur secara obyektif hasil belajar PDBK dan berlangsung adil (*fair*) sesuai dengan kondisi yang ada pada PDBK.

⁸⁴ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 61.

Berikut disajikan beberapa petunjuk umum pelaksanaan modifikasi penilaian bagi PDBK di kelas

inklusi, terkait dengan 5 aspek utama yaitu.⁸⁵

- Isi

Isi atau materi soal-soal penilaian yang diujikan kepada PDBK pada dasarnya samadengan soal-soal yang digunakan oleh peserta didik lainnya. Materi ujian yang bersifat kognitif yang biasa diujikan melalui ujian tulis, umumnya juga bisa diberlakukan sama kepada PDBK. dalam kondisi tertentu, dimungkinkan PDBK mengikuti su tansi ujian yang berbeda.

- Cara

Modifikasi dalam cara pelaksanaan penilaian bagi PDBK dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, hambatan, kebutuhan khusus PDBK, sehingga proses penilaian mudah diakses oleh PDBK.

- Alat

Beberapa PDBK memerlukan peralatan khusus untuk mendukung kemudahan dan kelangsungan penilaian. Diantaranya peralatan baca tulis Braille bagi tunanetra, alat bantu pembesar tulisan (*loop/magnifier*) bagi PDBK kurang lihat (*low-vision*)

⁸⁵ Laila S. Cahya, *Buku Anak Untuk ABK*, (Yogyakarta: Candra, 2015), 19.

- Pelaporan Hasil Belajar

Buku laporan hasil belajar (rapor) untuk PDBK dikelas inklusif mengikuti cara dan ketentuan umum, hanya saja ada beberapa catatan yang perlu ditambahkan yakni mengenai informasi pencapaian hasil belajar secara naratif-deskriptif yang terlampir.

- e) Kenaikan kelas, kelulusan, ijazah dan studi lanjut

- Kenaikan kelas, kelulusan dan perolehan ijazah untuk PDBK di kelas inklusi mengikuti prosedur atau ketentuan umum.
- PDBK yang telah menyelesaikan pendidikan di sebuah satuan pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- Sekolah memiliki kewajiban untuk membantu memfasilitasi PDBK yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

d. Dasar Pertimbangan Penempatan PDBK

Keputusan penempatan PDBK, apakah di kelas inklusi atau di kelas khusus, dilakukan oleh tim pendidikan khusus, dengan beberapa pertimbangan, antara lain:⁸⁶

⁸⁶ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 21.

1) Hambatan intelektual

Seorang PDBK yang mempunyai hambatan intelektual signifikan (hasil tes intelegensi dibawah 70) yang diperkirakan tidak dapat mengikuti kurikulum reguler, direkomendasikan ditempatkan dikelas khusus. Mereka yang kemampuan intelektualnya diperbatasan (antara 70-80) dapat berada di kelas inklusi atau dikelas khusus, berdasarkan kajian komperhensif atas *track record* anak selama ini.

2) Hambatan perilaku dan komunikasi

Seorang PDBK dengan hambatan perilaku dan komunukasi tanpa hambatan intelektual ditempatkan di kelas inklusi. Namun demikian, jika karena hambatan perilaku dan komunikasi yang cukup kompleks yang tidak memungkinkan ditempatkan di kelas inklusi (misalnya, membahayakan siswa lain, penyakit kronis berat, agresif, asosial) dapat ditempatkan dikelas khusus.

e. Fleksibilitas Pilihan Program Bagi PDBK

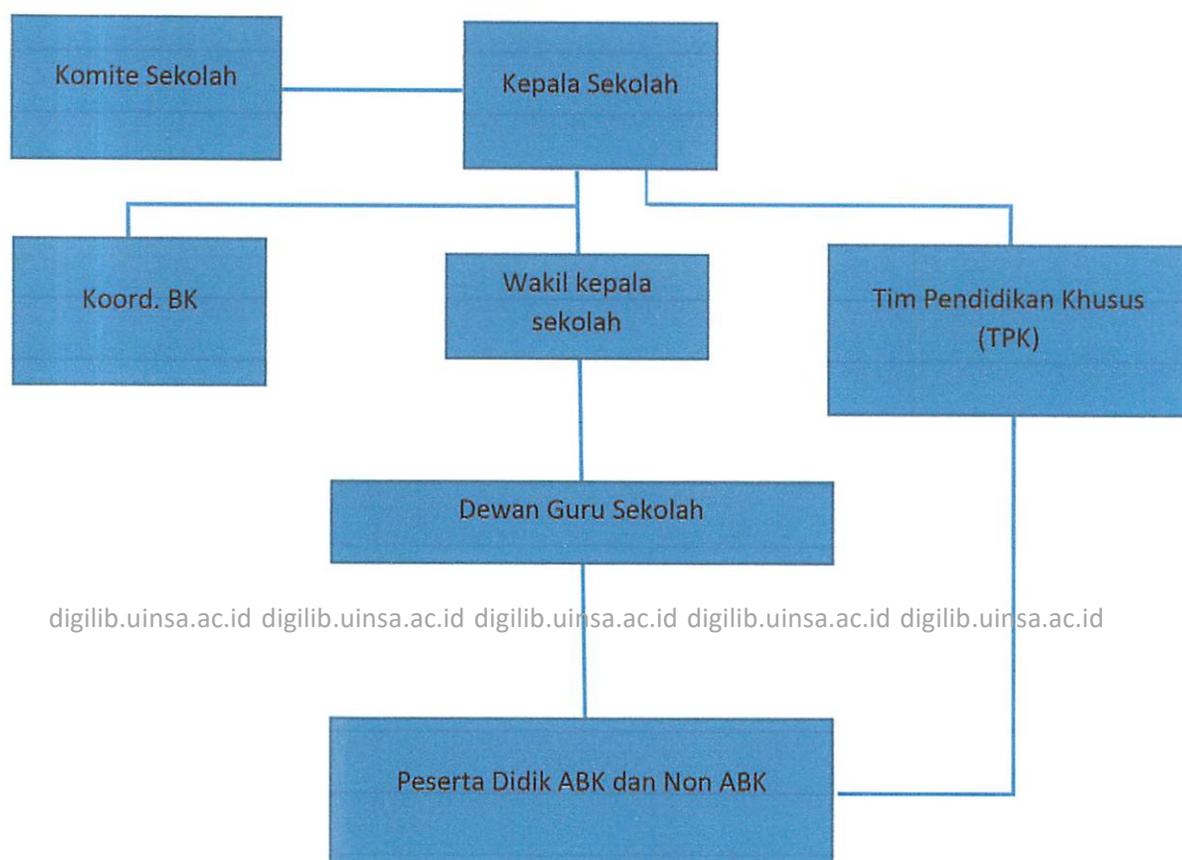
Penempatan seorang PDBK di kelas inklusi atau kelas khusus bersifat fleksibel, bukan permanen, artinya setiap saat dapat dipindah berdasarkan rekomendasi TPK setelah mengkaji hasil pemantauan dan evaluasi kemajuan belajar.⁸⁷

⁸⁷ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 22.

f. Struktur Organisasi Sekolah Inklusi

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi mengembangkan struktur organisasi sekolah yang mengakomodasi keberadaan TPK, dengan contoh berikut ini: ⁸⁸

Tabel 2.8
Contoh Struktur Organisasi TPK Bagi PDBK di Sekolah Inklusi



⁸⁸ Ibid., 23.

g. Data dan Sistem Informasi

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi harus menyusun sistem dokumentasi data dan informasi tentang semua aspek PDBK secara baik dan lengkap hal ini juga tak luput dari fungsi manajemen yang akan dijalankan pada sekolah berbasis kurikulum inklusi. Data yang perlu dihimpun antara lain:⁸⁹

- 1) Biodata anak dan orang tua
- 2) Riwayat pertumbuhan dan perkembangan anak
- 3) Riwayat perkembangan kesehatan
- 4) Laporan kemajuan belajar (akademik dan non akademik)
- 5) Laporan kemajuan program layanan kebutuhan khusus
- 6) Laporan hasil identifikasi asesmen
- 7) Karya yang pernah dihasilkan PDBK dll

Semua data tersebut harus disimpan dengan sistem *filling* yang memudahkan untuk diakses jika sewaktu-waktu diperlukan. TPK akan memanfaatkan semua data dalam mengambil kebijakan dan rekomendasi bagi PDBK.

h. Kemitraan

Pada implementasinya sekolah dengan kurikulum berbasis inklusi juga memerlukan kemitraan yang sesuai dengan variasi hambatan yang dialami oleh PDBK, penanganan akan melibatkan

⁸⁹ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 24.

banyak pihak bahkan berbagai profesi. Oleh karena itu, sekolah berbasis inklusi menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dengan PDBK, antara lain⁹⁰

- 1) Sekolah sumber, yaitu sekolah yang ditunjuk dan mempunyai kapasitas menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah inklusi disekitarnya. Sekolah sumber umumnya mempunyai sarana prasarana dan guru khusus yang memang dirancang untuk dimanfaatkan bersama dalam konteks *resource sharing*.
- 2) Sekolah Luar Biasa: SLB dapat juga difungsikan sebagai pusat sumber bagi sekolah berbasis inklusi, sepanjang sekolah tersebut memiliki sumberdaya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah inklusi. Kerjasama dengan SLB juga diperlukan dalam masa transisi, yaitu pembekalan program kebutuhan khusus sebelum PDBK mengikuti kegiatan akademik di sekolah inklusi (misalnya braille, orientasi mobilitas, komunikasi, yang tidak dapat dilakukan oleh guru-guru reguler).
- 3) *Assesment center*, yaitu lembaga yang mengkhususkan cakupan kerjanya pada pengembangan instrumen, pelaksanaan, dan penafsiran hasil asesmen. Lembaga sejenis ini dapat berbentuk pusat asesmen atau lembaga psikologi yang didirikan oleh pemerintah, perguruan tinggi atau masyarakat. Lembaga ini umumnya mempunyai perangkat dan tenaga profesional asesmen

⁹⁰ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus,..... 24.

memadai. Pada tahap identifikasi dan asesmen, sekolah berbasis inklusi perlu bermitra dengan pusat asesmen dimaksud.

- 4) Pusat terapi, yaitu lembaga yang memberikan berbagai jenis layanan kebutuhan khusus, seperti fisioterapi, okupasiterapi, psikoterapi, terapi wicara.
- 5) Perguruan tinggi, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terdekat sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung pengembangan sekolah, seperti pelatihan guru, penelitian, layanan asesmen.
- 6) Puskesmas/Rumah Sakit, untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan layanan medis, sekolah inklusi menjalin kerjasama dengan Puskesmas/Rumah Sakit terdekat.

Apabila lembaga-lembaga pendukung sebagaimana disebutkan di atas tidak tersedia di suatu wilayah tertentu, sekolah dengan kurikulum berbasis inklusi tetap melakukan upaya maksimal dalam melayani PDBK dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia.

Setelah mengetahui paparan diatas melalui pedoman pelaksanaan kurikulum bagi peserta didikberkebutuhan khusus di sekolah inklusi dan beberapa sumber lain, penulis mengetahui dan dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk keberhasilan manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi pemerintah melalui Kemendikbud RI telah menetapkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang mengikuti

pendidikan secara inklusi di sekolah reguler, menyediakan dua program pilihan yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya kelainan yang dialami PDBK, yakni program pendidikan di kelas inklusi dan program pendidikan di kelas khusus

i. Macam-Macam PDBK dan Bentuk Pelayanannya

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas bahwa pendidikan inklusi adalah salah satu program pendidikan yang memberikan kesempatan bagi ABK bersekolah umum dan belajar bersama-sama anak normal disertai dengan pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik⁹¹. Maka, tentulah peserta didiknya juga terdiri dari anak normal dan anak berkelainan atau ABK, yang mana ABK tersebut meliputi:

1) Anak Tunagrahita (Retardasi Mental)

Pendidikan atau layanan anak harus senantiasa ditingkatkan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Setiap hal yang baru harus terus diulang-ulang
- b) Tugas-tugas harus singkat dan sederhana
- c) Dorong dan bantu anak untuk bertanya dan mengulang
- d) Mengajar sesuatu harus dipotong atau dipecah menjadi bagian yang kecil sehingga mudah ditangkap anak

⁹¹ MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmun, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 75-76.

- e) Gunakan selalu peragaan dan mengulang prosesnya jika mengajar mereka
- f) Guru memberikan tugas-tugas pada tingkat kesulitan yang layak bagi setiap siswa.
- g) Guru merespon dengan perhatian dan pemahaman kepada siswa yang mempunyai tingkat kemampuan lebih rendah
- h) Melakukan umpan-balik (*feedback*) segera mungkin terhadap perilaku khusus yang dilakukan dengan baik, jika perlu diberikan melalui bentuk rewards atau pemberrian hadiah.

2) Anak Berkesulitan Belajar Spesifik

Layanan kebutuhan bagi anak berkesulitan belajar spesifik di kelas inklusi adalah⁹²:

- a) Ubahlah cara mengajarkan dan jumlah materi baru yang akan diajarkan
- b) Berikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang
- c) Buatlah sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan diakses
- d) Dapat menggunakan alat bantu media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kebutuhan peseta didik, sehingga anak tertarik dan termotivasi untuk giat belajar.
- e) Dan digunakan model pembelajaran bagi inklusi yang sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta didik.

⁹² MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmn, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*,.....78.

3) Anak Tunanetra (anak yang memiliki gangguan pengelihatatan)

Kebutuhan pembelajaran anak tunanetra. Karena keterbatasan anak tunanetra, maka pembelajaran bagi anak tunanetra harus mengacu kepada prinsip-prinsip: Kebutuhan akan pengalaman konkrit, kebutuhan akan pengalaman memadukan, Kebutuhan akan berbuat dan bekerja dalam belajar.

Media pendidikan anak tunanetra. Media bagi anak tunanetra dikelompokkan menjadi dua yaitu⁹³: Kelompok buta yang media pembelajarannya adalah tulisan Braille dan Kelompok low vision dengan medianya adalah tulisan awas yang dimodifikasi (misalnya huruf diperbesar, penggunaan alat pembesar tulisan).

4) Anak Tunarungu (anak yang memiliki gangguan pendengaran)

Kebutuhan pembelajaran anak tunarungu, adalah:

a) Dalam berbicara jangan membelakangi anak

b) Jangan bergerak di sekitar ruangan ketika sedang bicara di kelas

c) Anak hendaknya duduk dan berada di tengah paling depan kelas

sehingga mudah membaca bibir guru.

d) Usahakan tangan anda jauh dari wajah ketika sedang berbicara

e) Dorong anak untuk memperhatikan wajah guru dan bicara dengan anak dengan posisi berhadapan dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak.

⁹³ MIF. Baihaqi dan M. Sugiarnin, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*,.....78-79.

f) Pastikan menghadap kelas ketika sedang menerangkan materi dari papan tulis

g) Guru bicara dengan volume biasa tetapi gerakan bibirnya harus jelas.

5) Anak Tunadaksa (anak yang mengalami kelainan anggota tubuh/gerakan)

Guru sebelum memberikan pelayanan dan pengajaran bagi anak tunadaksa harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Segi medisnya: Apakah ia memiliki kelainan khusus seperti kencing manis, atau pernah dioperasi, masalah lain seperti harus minum obat dsb.

b) Bagaimana komunikasinya: Apakah anak mengalami kelainan dalam berkomunikasi, dan alat bantu dan sebagainya. Ini berhubungan dengan lingkungan yang harus dipersiapkan.

c) Bagaimana kemampuan gerak dan berpergiannya: Apakah anak mengalami kelainan dalam berkomunikasi, dan alat komunikasi apa yang digunakan (lisan, tulisan, isyarat) dsb⁹⁴

6) Anak Tunalaras (anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku)

Beberapa cara yang dianjurkan dalam mempersiapkan suasana kelas yang dapat meningkatkan sikap-sikap positif:

⁹⁴ MIF. Baihaqi dan M. Sugiarnin, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*,.....79

- a) Berikan perhatian dan pengakuan kepada siswa atas sifat sifat dan prestasi positif
 - b) Buatlah contoh sikap, kebiasaan kerja, dan hubungan yang positif
 - c) Persiapkan pula pengajaran dan berikan kurikulum yang tersusun dengan baik
 - d) Buatlah suasana kelas yang dapat diterima, baik secara fisik maupun sosial.⁹⁵
- 7) Anak Tunawicara (Anak yang mengalami gangguan komunikasi)
- Strategi-strategi yang dapat membantu pengajaran siswa tunawicara adalah:
- a) Mengajarkan bahasa yang baik dan benar lebih banyak melalui contoh-contoh dibanding koreksi, misalnya anak mengatakan: “Saya boleh nilai delapan”, guru mengatakan “Bagus, kamu mendapat nilai delapan”.
 - b) Berilah siswa perhatian penuh ketika berbicara
 - c) Menciptakan suasana ruang kelas yang membuat anak merasa nyaman untuk bertanya atau berpartisipasi dalam diskusi kelas.⁹⁶

⁹⁵ MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmun, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*,.....80.

⁹⁶ Ibid., 80.

8) Slow Learner (anak lamban belajar)

Kebutuhan pembelajaran bagi anak lamban belajar yaitu:

- a) Ketelatenan dan kesabaran guru untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan penjelasan
- b) Menuntut digunakannya media pembelajaran yang variatif
- c) Memperbanyak kegiatan remedial
- d) Memberikan motivasi secara langsung dan terus menerus
- e) Mereview materi agar selalu ingat⁹⁷

9) Anak Berbakat (memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa)

Anak berbakat sering juga disebut sebagai : gifted dan talented⁹⁸. Untuk program pendidikan bagi anak seperti ini dikembangkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kemampuan eksplorasi
- b) Materi kurikulum dapat diperdalam dan diperluas
- c) Jangan mengharuskan setiap siswa mengikuti kegiatan, tetapi bagikanlah kegiatan itu sesuai minatnya.
- d) Biarkan anak-anak untuk belajar dan menjelajahi sendiri yang diminati.
- e) Akselerasi yaitu percepatan atau maju berkelanjutan dalam mengikuti program yang sesuai dengan kemampuannya, dan juga dibatasi oleh jumlah waktu atau tingkat kelas.⁹⁹

⁹⁷ MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmim, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*,.....81.

⁹⁸ Ibid., 80-81.

⁹⁹ Ibid., 81.

BAB III

METODE PENELITIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni manajemen kurikulum di sekolah inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian, maka metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan ini karena data yang dikaji dan dihasilkan adalah deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Pendekatan ini, diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.³ Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan objek dan subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.⁴

¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

² *Ibid.*, 5.

³ Cholid Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 3.

⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 5.

Maka dari itu penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian *naturalistic*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variable penelitian.⁶

Penelitian dengan metode deskriptif merupakan penelitian yang melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif, analisis data didasarkan pada data yang diperoleh yang kemudian dikembangkan dengan pola-pola tertentu. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Peneliti mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti perlu membuat catatan dulu di lapangan, yang kemudian dibuatkan kode dan dianalisis dalam berbagai cara.

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 01-03.

⁶ Sanapiah Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

⁷ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Rajawali Press: 1994), 73.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan di dua tempat. Pertama di SMPN 29 Surabaya. Kedua, SMPN 3 Krian. Di mana kedua sekolah tersebut sama-sama memiliki Akreditasi sekolah yang sama yakni “A” dan berbasis Inklusi hal ini untuk menggali dan menemukan data-data yang diperlukan.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁸ Penentuan informan dalam penelitian sangatlah penting, informan atau responden tidak sekedar memberikan respon atau komentar, sebab merekalah pemilik informasi tersebut. Dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dalam penelitian ini ada beberapa informan, antara lain:

1. Kepala sekolah. Informasi yang diperoleh yakni keadaan sekolah inklusi khususnya mengenai kurikulum inklusi baik bagi peserta didik reguler ataupun PDBK dan proses manajemennya. Termasuk upaya kepala sekolah dalam memaksimalkan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan peserta didik di sekolah Inklusi.
2. Waka kurikulum. Informasi yang didapatkan yaitu kurikulum yang digunakan baik bagi peserta didik reguler ataupun PDBK, alasan mengapa menggunakan kurikulum tersebut. Bagaimana cara menentukan pemilihan

⁸ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 221.

kurikulum yang tepat baik bagi peserta didik reguler ataupun PDBK. bagaimana cara atau upaya memanage agar kurikulum inklusi di sekolah dapat berjalan dengan baik dan efektif. Keberadaan serta peran Guru pembimbing khusus maupun Guru kelas reguler dan fasilitas apa saja yang disediakan sekolah untuk PDBK.

3. Koordinator Kurikulum Inklusi. Informasi yang didapatkan yaitu kurikulum yang digunakan bagi PDBK, alasan mengapa menggunakan kurikulum tersebut. Bagaimana cara menentukan pemilihan kurikulum yang tepat bagi PDBK. bagaimana cara atau upaya untuk memanage agar kurikulum inklusi di sekolah dapat berjalan dengan baik dan efektif. Keberadaan serta peran Guru pembimbing khusus maupun Guru kelas reguler dan fasilitas apa saja yang disediakan sekolah untuk PDBK. bagaimana upaya koordinator untuk meningkatkan kualitas GPK. Jenis disabilitas yang terdapat di sekolah. Kelanjutan siswa dijenjang selanjutnya.

4. Guru Pembimbing Khusus (GPK) Informasi yang didapatkan yaitu kurikulum apa yang tepat untuk sekolah berbasis inklusi bagi PDBK. Kurikulum apa yang saat ini digunakan oleh sekolah. Bagaimana cara menentukan pemilihan kurikulum atau bahan ajar bagi PDBK. Adakah RPP untuk siswa inklusi. Metode atau strategi apa yang digunakan untuk menghadapi PDBK agar tetap kondusif dalam KBM pada saat belajar bersama dengan peserta didik reguler ataupun tidak. Peran GPK. Latar belakang dan status akademik/syarat menjadi GPK. Kesiapan fasilitas

sekolah terhadap PDBK. upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan kurikulum inklusi. Bagaimana cara mengetahui perkembangan PDBK.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Guru Umum. Informasi yang didapatkan yaitu bagaimana perlakuan terhadap peserta didik reguler ataupun PDBK. Bagaimana siswa reguler menghadapi PDBK di dalam kelas. Adakah perbedaan tugas atau disamakan dalam mata pelajaran. Bagaimana bentuk penilaian atau bentuk hasil evaluasi belajar baik bagi peserta didik reguler ataupun PDBK.

6. PDBK. Informasi yang didapat yaitu mengenai perasaan mereka berada di dalam kelas reguler maupun di kelas khusus. Pemahaman mereka mengenai materi yang disampaikan.

7. Orang Tua PDBK. Informasi yang didapatkan yaitu kekurangan dan kelebihan kurikulum inklusi PDBK. Perkembangan hasil belajar PDBK. Pendapat mengenai hasil perkembangan anak selama berada di sekolah inklusi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.⁹ Dalam melaksanakan suatu penelitian biasanya digunakan lebih dari satu metode atau

⁹ Moh. Nasir, *Metoda Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 174.

instrumen, agar kelemahan yang satu dapat ditutupi dengan kebaikan yang lain.¹⁰ Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpul data sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap sesuatu yang diselidiki. Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.¹¹

Metode ini diterapkan dalam rangka mengamati manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi antara SMPN 29 Surabaya dan SMPN 3 Krian, dalam hal ini menyangkut pemilihan kurikulum, implementasi kurikulum inklusi dan bagaimana upaya sekolah maupun guru pembimbing khusus (GPK) dalam memberikan fasilitas yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar baik bagi perkembangan peserta didik reguler maupun PDBK. (lembar observasi dilampirkan)

Peneliti menggunakan instrumen observasi ini karena dinilai hasil dari observasi sangat membantu dalam menambahkan informasi yang diperoleh di sekolah. Data yang diperoleh dari observasi tersebut dapat

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 132.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 38.

memperkuat informasi yang diperoleh peneliti baik dari hasil wawancara ataupun dokumentasi, sehingga hasil yang didapat semakin akurat.

2. Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹²

Interview ini menggunakan wawancara terstruktur, wawancara terbuka, dan wawancara tertutup. Terstruktur yaitu wawancara menggunakan pedoman dengan instrumen wawancara yang disusun secara terperinci dengan beberapa pertanyaan terbuka. Terbuka yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas/ tidak terikat jawabannya. Dan tertutup artinya wawancara berdasarkan pertanyaan yang terbatas dan terikat jawabannya, dengan memakai pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.¹³

Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari informan penelitian mengenai manajemen kurikulum di kedua sekolah inklusi tersebut. kurikulum apa yang digunakan, strategi pembelajaran, keberadaan dan peran GPK, fasilitas serta bahan ajar penunjang dan bagaimana proses

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 145.

¹³ Masudi, *Jenis-jenis Wawancara*, <http://id.shoong.com/writing-and-speaking/2238596-jenis-jenis-wawancara>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

belajar mengajar untuk peserta didik reguler maupun PDBK agar bisa berkembang dan bisa naik ke jenjang selanjutnya.

Metode ini digunakan dengan alasan bahwa informasi yang diperoleh dari *interview* dapat dijadikan sebagai acuan awal dalam melaksanakan tahap penelitian selanjutnya.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, berdasarkan hal ini metode dokumentasi adalah yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa peninggalan tertulis seperti buku-buku, arsip-arsip, ataupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan masalah penelitian.¹⁴

Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.¹⁵

Dibandingkan dengan metode lain, metode ini dianggap tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber, datanya masih bersifat tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dari benda-benda mati termasuk yang tertulis seperti data dari dokumen sekolah (profil

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktik)*, 149.

¹⁵ *Ibid.*, 150,

sekolah), data siswa PDBK, data mengenai responden yang diteliti, keadaan ruangan khusus siswa PDBK, dan arsip-arsip hubungan sekolah dengan wali murid PDBK beserta data perkembangannya.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai tujuan bagi orang lain.¹⁶

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan kejadian yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi selama penelitian yang dilakukan di sekolah inklusi yakni SMPN 29 Surabaya dan SMPN 3 Krian. Teknik ini menggunakan teknik yang melalui 3 tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan data, dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan *final* akhirnya (diverifikasi). Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal

¹⁶ Neong Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesrasin, 1998), 186.

pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.¹⁷ Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya.¹⁸

Penulis perlu mereduksi data untuk memilih dan merangkum data-data yang masuk melalui wawancara dari beberapa narasumber maupun dengan metode lain seperti observasi dan dokumentasi. Penulis perlu memilah antara data-data yang fokus mengenai manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi.

2. Display Data atau Penyajian Data

Display data atau penyajian data atau informasi secara tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu dapat berupa matriks, grafik, networks dan chart.¹⁹ Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak terpaku pada tumpukan data, serta memudahkan peneliti untuk merencanakan tindakan selanjutnya.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 246.

¹⁸ Ibid., 338.

¹⁹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, 120.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi atau kesimpulan merupakan tahap akhir dan analisis data puncak. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian sedang berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang Valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan, dan persamaan untuk diambil kesimpulan.²⁰

Kesimpulan akhir/ *final* mungkin tidak muncul sampai pengambilan data terakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penulis dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sejak awal.²¹ Dalam reduksi data ini penulis memilih data-data yang diperoleh selama melakukan proses penelitian. Hal ini dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan *final*-nya dapat diverifikasi.

²⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, 130.

²¹ Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 195.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

Ada tiga tahap yang peneliti lalui agar dapat menghadirkan hasil penelitian yang menyeluruh. Dari observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan untuk dapat mendukung penelitian ini. Memerlukan waktu beberapa bulan peneliti harus berusaha, berkumpul, mencari narasumber, dan mengamati seluruh proses bimbingan yang dilaksanakan di beberapa sekolah berbasis inklusi tersebut. Hingga akhirnya, peneliti dapat menyajikan data-data sebagaimana berikut ini. Peneliti dalam penyusunan hasil wawancara, peneliti uraikan menjadi tiga bagian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diawal. Adapun kontruksi tersebut adalah:

1. Manajemen Kurikulum di Sekolah Inklusi Di SMP Negeri 29 Surabaya

Mengenai Kurikulum yang digunakan serta langkah perencanaan oleh sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya sebagai kegiatan

belajar mengajar (KBM) untuk peserta didik reguler adalah kurikulum 2013 yang telah ditentukan oleh permendiknas RI dan untuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) menggunakan Program Pembelajaran Individual atau biasa disebut PPI, hal ini diketahui berdasarkan keterangan dari Bu Giyanti selaku kepala sekolah yang mengatakan:

“karna dengan keadaan sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas sebagai sekolah inklusi dengan kebutuhan setiap individu PDBK nya berbeda, maka SMPN 29 menggunakan kurikulum pembelajaran PPI. Untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh PDBK, Kami pihak sekolah juga harus saling

pembelajaran PPI. Untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh PDBK, Kami pihak sekolah juga harus saling terbuka dengan orang tua PDBK, diawal kita memanggil wali murid untuk saling menceritakan keadaan sekolah dan keadaan PDBK, karena untuk keberhasilan KBM juga butuh kerjasama, ini juga supaya wali murid ga ngeculno cul anak'e ke sekolah mbak, kalau sepeti itu juga kan kasian anaknya juga nanti, dalam keadaan sepertinini faktor orangtua mempengaruhi juga untuk perkembangan PDBK termasuk dalam hal akademik. Sedangkan untuk siswa regulernya sekolah kita menggunakan kurikulum 2013".¹

Hal itu didukung pula oleh Pak Taufiq Selaku koordinator kurikulum inklusi dan guru mata pelajaran yang mengungkapkan bahwa:

"pakai kurikulum 2013 sekolah kita trus untuk PDBKnya yaa..kan kalau kita ini pakai PPI mbak, jadi ya menyesuaikan kebutuhan perindividu PDBKnya, dari pihak inklusi dari sekolah melakukan identifikasi dengan asesmen yang dimiliki PDBK sebelum ke proses belajar mengajar yang lebih lanjut, dengan kondisi yang seperti ini juga sekolah harus tetap memaksimalkan karena kan memang sudah ditunjuk oleh Dinas sebagai sekolah inklusi"²

Dan kemudian dipastikan kembali oleh pernyataan Bu Nella selaku GPK dengan menambahkan prosedur identifikasi hambatan yang dialami PDBK, yang mengatakan:

"Iya mbak, Disini (SMP Negeri 29 Surabaya) menggunakan PPI mbak, program pembelajaran individual dan modifikasi, setelah tau kebutuhan anaknya lewat asesmen tadi kita tetap menyesuaikan kebutuhan PDBK akan hambatan dan ketunaanya.jadi pada saat awal penerimaan peserta didik baru itu GPK mencoba mengidentifikasi PDBK nya melalui asesmen atau SK dari Dinas, kita juga menyediakan form yang harus diisi oleh orang tua wali murid untuk memudahkan kita mengetahui hambatan dan pelayanan khusus sesuai kebutuhan PDBK perindividunya."³

¹ Wawancara Dengan Ibu Giyanti Pada Hari Senin, 15 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

² Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru.

³ Wawancara Dengan Ibu Nella, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

Pada saat peneliti wawancara dengan pak Budi selaku Guru
matapelajaran sekaligus humas pun juga menanyakan hal tersebut.

“...emm untuk PDBKnya ya setau saya PPI itu loh, menyesuaikan keadaan PDBK karna kan kalau menghadapi PDBK itu segala macamnya tidak bisa dipaksakan, yang penting anaknya mau belajar dan masuk sekolah untuk siswa regulernya pakai kurikulum 2013”.⁴

Ditanya alasan mengapa sekolah memilih menggunakan kurikulum tersebut Bu Giyanti selaku kepala sekolah mengatakan:

“sesuai dengan keputusan pemerintah ya kita tinggal mengaplikasikan saja dilapangan sedang untuk PDBKnya karena ya setelah melakukan rapat koordinasi dengan GPK dinilai kurikulum itu yang paling pas dengan tujuan kita agar kompetensi yang sesuai dengan PDBK bisa dicapai”⁵

Pak Taufiq selaku koordinator inklusipun juga mengatakan:

“iya karna memang kita perlu menyesuaikan dengan kebutuhan PDBKnya, selain itu juga kondisi mental dan emosinya yang sering berubah-ubah”.⁶

Selain Bu Giyanti dan Pak Taufiq, Bu Dwi selaku GPK juga
mengutarakan alasan mengapa menggunakan PPI dan modifikasi melalui
penyataannya berikut:

“iya kalau kita tetap menyesuaikan kebutuhan anak, lihat kondisi anak juga karena setiap saat kondisi PDBK bisa berubah baik secara mental dan emosinya, jadi menurut kami ya PPI itu memang tepat.”⁷

⁴ Wawancara Dengan Pak Budi, Pada Hari Senin, 15 Agustus 2016, Pukul 08.15 di Ruang Guru.

⁵ Wawancara Dengan Ibu Giyanti Pada Hari Senin, 15 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

⁶ Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru.

⁷ Wawancara Dengan Ibu Nella, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 11.00 di Ruang BK.

Selain dengan melakukan identifikasi kebutuhan PDBK sekolah juga merancang 1) Analisis mata pelajaran (AMP), 2) Kalender Akademik, 3) penyusunan Program tahunan (PROTA), 4) penyusunan Program semester (PROMES), 5) Proram satuan pelajaran, dan 6) rencana pengajaran. Dalam hal ini Bu Nela mengatakan:

“iya tentu ada seperti hal dimaksud tadi, PROTA nya ada jadwal pelaksanaan program belajar juga sudah dibuat, namun PROMES nya disama ratakan dengan PROMES peserta didik reguler dan kita juga bekerja sama dengan guru BK dan guru kelas untuk membuat jadwal perencanaan pembelajarannya Untuk RPP nya ada tapi kita tidak buat setiap hari atau setiap mau mengajar tidak, karna waktu dan tenaga kita juga terbatas, kalau kita difokuskan membuat itunya nanti malah kasian PDBKnya nanti penangannya jadi kurang”.⁸

Selain itu Bu Dwi yang juga selaku GPK mengatakan hal yang sama dengan menambahkan jadwal pembelajaran kelas bagi PDBK:

“iya kalao kita tetap menyesuaikan kebutuhan anak, lihat kondisi anak juga karna setiap saat kondisi PDBK bisa berubah baik secara mental dan emosinya. Kalaupun kita rencanakan diawal juga nanti pasti akan berbeda pada saat implementasinya. Namun kita tetap menjadwalkan PDBK untuk melakukan pembelajaran khusus di “ruang pintar” dengan mengklasifikasikan ketunaannya, yang itu pun juga terkadang tidak berjalan sesuai dengan jadwal, pintar-pintar GPKnya aja menyesuaikan dengan keadaan PDBK pada saat itu, jika tidak memerlukan penanganan khusus ya kita tetap biarkan dia belajar di kelas reguler atau inklusi bareng dengan yang lain (umum)”.⁹

Mengenai hal tersebut Bu Giyanti sebagai kepala sekolah juga menguatkan pernyataan GPK tersebut:

⁸ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

⁹ Wawancara Dengan Ibu Dwi Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

“iya kita juga ada PROTA, kalender akademik, dan RPP untuk peserta didik reguler dan khusus PDBK namun untuk RPP sendiri tidak bersifat wajib bagi setiap GPK menyusunnya setiap kali akan memulai KBM berbeda RPP bagi siswa reguler yang merupakan rangkaian SOP bagi guru sebelum mengajar, hanya saja ada dan terlampir.”¹⁰

Pak Taufiq juga mengiyakan dengan menambahkan proses pembuatannya:

“iya kita (Tim khusus) yang ditunjuk kepala sekolah untuk membuatnya, dan mengenai penyusunannya sudah ada panduan dari Dinas, namun implementasinya memang kita akui hingga saat ini belum bisa konsisten dalam KBM.”¹¹

Disinggung mengenai upaya sekolah dalam keberlangsungan KBM agar kurikulum sekolah bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Bu Giyanti dalam wawancara mengatakan:

“beberapa tahun yang lalu sebelum masuk ajaran baru, saya lupa tepatnya tahun berapa, sebagai tanggung jawab kita kepada amanah yang diberikan oleh Dinas untuk sekolah kita menjadi sekolah inklusi, kami membentuk Tim Pendidikan Khusus (TPK) secara permanen yang dikoordinatori langsung oleh Pak Taufiq dengan beranggotakan guru pendidikan khusus (GPK) sebanyak 3 orang yang dikirimkan melalui Dinas, yakni Bu Nella, Bu Rachma dan Pak Doni. Tim inilah yang memang memiliki kompetensi dibidang pendidikan inklusi yang akan mengkoordinasikan penyediaan layanan bagi PDBK, dari tahap penerimaan, identifikasi, asesmen, penempatan program hingga pemilihan kurikulum bagi hambatan yang dimiliki oleh setiap PDBK.”¹²

Dan didukung pula oleh pernyataan Pak Taufiq selaku koordinator inklusi, mengatakan:

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu Giyanti Pada Hari Senin, 15 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru.

¹² Wawancara Dengan Ibu Giyanti Pada Hari Senin, 15 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

“iya kita kerja sama dengan GPK, guru BK dan juga guru matapelajaran dalam KBM untuk PDBK, saling berkomunikasi tentang apa-apa saja yang mengenai KBM PDBK meskipun kelihatannya ruangan kita terpisah tapi kita tetap berkordinasi semaksimal mungkin.”¹³

Dan didukung pula oleh pernyataan Ibu Nella selaku GPK yang mengatakan:

“iya kita dikoordinatori langsung oleh Pak taufiq dengan Tim pendidik khusus yang memang telah dibentuk oleh kepala sekolah. Selain itu selaku GPK sendiri kami juga saling membantu dalam menangani PDBK yang sering tidak terduga, dengan membagi tugas dan membuat jadwal pembagian kelas bagi PDBK dengan tidak lupa juga membutuhkan konfirmasi dengan guru BK dalam pembagian jadwalnya”.¹⁴

Pernyataan diatas diperkuat lagi oleh Pak Budi selaku Humas dan Guru matapelajaran di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya yang pada saat itu mengatakan:

“ohh.. kalo untuk kurikulum inklusinya bisa ke (menemui) pak Taufiq langsung selaku koordinator kurikulum inklusi, atau ke ruang pintar (ruang sumber) disana ada GPKnya”.¹⁵

Ditanya mengenai keadaan GPK di SMP Negeri 29 Surabaya Bu

Giyanti sebagai kepala sekolah menegaskan:

“di sekolah kami saat ini ada 3 GPK yang beliau ini memang ditugaskan oleh Dinas, tugas nya ya agar KBM di sekolah inlusif bagi PDBK ini bisa berjalan dengan baik meskipun kami rasa keadaanya sampai sekarang juga belum maksimal, kita akui jumlah GPK nya pun sebetulnya kurang namun hal ini belum ditanggapi kembali oleh Dinas, namun kita warga sekolah tetap berusaha semaksimal mungkin kan memang wajar bila di lapangan memang terjadi hal-hal yang memang

¹³ Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru.

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Budi, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.00 di Ruang Guru.

sebelumnya tidak diduga. Ya kita kita ini yang akan lebih tau mengenai keadaan sekolah inklusi sebetulnya.”¹⁶

Pak Taufiq selaku Koordinator inklusi juga membenarkan hal tersebut dengan mengatakan:

“iy jumlah GPK nya 3 orang mbak, saat ini ruang GPK nya ada di Ruang Pintar, bersamaan dengan ruang sumber sebagai kelas khusus”¹⁷

Dan didukung pula oleh pernyataan Ibu Nella selaku GPK yang juga menambahkan peran serta, bentuk kerjasama dan pembagian tugas antar GPK yang ada di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya, yang mengatakan:

“Iya, disini GPKnya 3 orang, sebetulnya dari Dinas ada 4 orang tapi yang satu kemarin baru saja pindah karena baru saja menikah dan ikut suaminya, jadi tinggal saya, Bu Dwi dan Pak Doni GPKnya. Cukup kerepotan sih karna Cuma bertiga karena PDBKnya 55 anak tahun ini jadi perbandingan antara GPK dengan PDBKnya 1:19, dan Dinas belum merspon mengenai kurangnya tenaga GPK, jadi ya kita saling menyadari dan saling membantu dan membagi tugas saja Bu Dwi memegang siswa inklusi kelas VII, Pak Doni kelas VIII dan Saya kelas XI”¹⁸

Penempatan peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK tidak bisa sembarangan, Pak Taufiq selaku koordinator inklusi mengatakan:

SMP Negeri 29 Surabaya menyediakan dua program pilihan yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya kelainan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus yakni bagi PDBK tingkat ringan, mengikuti program pendidikan di kelas inklusi sedangkan bagi PDBK tingkat berat

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Giyanti Pada Hari Senin, 15 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru.

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Nella, Pada Hari Senin, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

mengikuti program pendidikan di kelas khusus. Untuk menentukan hal tersebut pada saat awal penerimaan PDBK sekolah melakukan identifikasi

melalui asesmen yang dimiliki PDBK, baik surat keterangan dari Dinas,

Rumah sakit serta wawancara dan pengisian angket yang terlampir oleh wali murid. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Bu Nella selaku GPK yang mengatakan:

“setelah tau hambatan pada PDBK kita juga menentukan penempatan kelasnya, ini juga dilakukan berdasarkan karakter yang dimiliki siswa reguler dan PDBK yang disesuaikan, semaksimal mungkin PDBK yang tingkat ringan harus mau belajar di kelas inklusi dengan peserta didik reguler. Tapi juga ada PDBK yang tingkat hambatannya berat sehingga dari pagi atau awal jam pelajaran PDBK dengan hambatan yang berat itu kita langsung tempatkan di kelas khusus atau yang biasa warga SMP Negeri 29 ini “Ruang Pintar”.¹⁹

Jumlah PDBK yang ada di SMP Negeri 29 adalah sebanyak 55 hal ini didukung pernyataan dari Pak taufiq selaku koordinator GPK yang mengatakan:

“Pada tahun ajaran 2015/2016 tercatat jumlah PDBK di sekolah inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya sebanyak 57 orang. Salah satu keistimewaan sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya ini adalah usianya yang paling tua sebagai sekolah inklusi yang telah ditunjuk oleh Dinas, dan ketunaan PDBKnya pun paling berat dan beragam.”²⁰

Dan dibenarkan oleh Bu Nella selaku GPK yang mengatakan:

“siswa PDBKnya 55 mbak, dari kelas VII-IX ada 19 PDBK, ketunaanya beragam, ada autisme, tunagrahita, tunadaksa, low vision, slow learner dll. ketunaan yang kita punyai beragam, untuk yang paing berat ya yang hambatannya double atau majemuk, saat ini yang seperti itu ada gabungan dari tunagrahita

¹⁹ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru.

dan *low vision*. Untuk PDBK yang seperti ini dari pagi kita sudah panggil untuk keruang khusus untuk dapat pelayanan dan terapi diruang khusus.²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Didukung pula dengan pernyataan Pak Eko selaku guru matapelajaran PAI dengan menambahkan jumlah PDBK di setiap kelasnya.

Beliau mengatakan:

“iya mbak kelas VII-IX itu masing-masing ada 19 PDBK dan di tiap satu kelas atau rombel ada 1-2 orang PDBK tergantung berat ringannya hambatan yang dialami.”²²

Salah satu keistimewaan sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya ini adalah usianya yang paling tua sebagai sekolah inklusi yang telah ditunjuk oleh Dinas, dan ketunaan PDBKnya pun paling berat dan beragam. Meski demikian agar proses kegiatan belajar mengajar (PKBM) siswa inklusi bisa berjalan dengan efektif dan efisien sekolah berusaha memaksimalkan fasilitasnya yang lengkap, karena manajemen yang baik tidak terlepas juga oleh sarana prasana, dalam sekolah inklusi terutama ruang sumber atau “ruang pintar” yang juga sebagai kelas khusus bagi PDBK. hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Nella selaku GPK yang mengatakan:

“cukup lengkap fasilitas yang menunjang pelaksanaan pembelajaran untuk PDBK, ini saja sekarang ruang pintar atau kelas khususnya sedang direnovasi jadi untuk sementara waktu ruang khusus kita gabung dengan ruang BK, hehehe.. di dalamnya juga ada ruang teraphy, untuk alat mungkin kita sedikit kurang mengenai jumlah kursi roda, karna sudah banyak

²¹ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

²² Wawancara Dengan Bapak Eko Selaku Guru matapelajaran PAI, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 12.30 di Ruang Guru.

yang terpakai, jadi beberapa dari PDBK ada yang membawa kursi roda sendiri dari rumah”.²³

Keberadaan sarpras juga dibenarkan oleh Pak Taufiq selaku Koordinator inklusi yang mengatakan:

“iya alhamdulillah untuk ruang sumber bagi PDBK nya sudah ada dan lengkap dengan alat dan bahan ajar dan alat terapi bagi masing-masing ketunaan, namun saat ini ruang pintar sedang direnovasi jadi sementara kelas khususnya disatukan dengan ruang BK.”²⁴

Jadwal pendampingan siswa berkebutuhan khusus di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya, diharapkan dapat membantu terlaksanakannya PKBM dengan efektif dan efisien sehingga PDBK mampu berkembang dan mendapatkan hasil yang sesuai dan diharapkan. Keberadaan ruang pintar dan sarana prasarana yang lengkap harus digunakan sebagai tempat pembelajaran individual dan bukan sebagai ruang untuk menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus sepanjang waktu.

Meskipun proses belajar mengajar pada PDBK tidak bisa dipaksakan dengan memberikan materi-materi kepada mereka tetapi justru menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, sekolah tetap menanamkan dan membina membentuk karakter PDBK agar juga bisa disiplin sengan tidak terlalu memanjakan PDBK tentu dengan porsinya, hal demikian juga bertujuan untuk membentuk secara perlahan karakter PDBK. hal ini terbukti

²³ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru.

ampuh dan mendapat respon positif dari orangtua wali murid siswa kelas

VII yang mengatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“iya mbak, anak saya tunagrahita jadi perkembangannya juga lambat, tapi alhamdulillah meskipun baru beberapa bulan masuk sekolah disini tapi perubahannya sudah mulai terlihat, kemampuannya bertambah dan semakin mempunyai spirit dan perlahan mau diarahkan, gurunya disini ya tegas ya telaten”.²⁵

Sistem evaluasi menurut Pak Taufiq selaku koordinator Inklusi di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya mengatakan:

“dalam sekolah berbasis inklusi ini dilihat dari setiap kemampuan PDBK yaitu dengan cara melihat dari nilai akademik dan non akademik terutama dalam perubahan sikap, ada form penilaian juga untuk PDBk untuk hasilnya bisa dilihat di ruang pintar dengan GPK”.

Penjelasan mengenai evaluasi juga didapatkan melalui wawancara dengan salah satu GPK yang mengatakan:

“karena kan kalo siswa inklusi tidak ada anak yang tinggal kelas, jadi sudah pasti akan lulus semuanya. Tinggal untuk perencanaan pembuatan kisi-kisi soal ujian atau test memang kita membuatnya dengan bekerja sama dengan GPK-GPK dari 20 sekolah berbasis inklusi di Surabaya atau MGPK untuk sebulan sekali mengadakan pertemuan, dimana pertemuan itu juga selain membahas evaluasi siswa juga membahas tentang perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya dengan mempertimbangkan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK”.²⁶

Mengenai data penilaian perkembangan PDBK sekolah juga mempunyai form-form yang isinya merupakan deskripsi perkembangan

²⁵ Wawancara Dengan Wali Murid PDBK Kelas VII, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 12.30 di Kantin.

²⁶ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

siswa setiap minggunya, yang selanjutnya satu bulan sekali akan dilaporkan melalui rekapan kepada sekolah. Penilaian hasil belajar PDBK dapat dilakukan bersamaan dengan peserta didik pada umumnya atau tempat lain sesuai kebutuhan PDBK. Misalnya, dikelas tidak tersedia komputer padahal peserta didik membutuhkannya untuk pelaksanaan ujian. Ujian dapat dilaksanakan di tempat dimana peralatan komputer tersedia. Buku laporan hasil belajar PDBK mengikuti cara dan ketentuan umum dan perlu ditambahkan pada rapor PDBK tentang informasi hasil belajar secara naratif-deskriptif, terutama pada materi/kompetensi yang mengalami modifikasi.

Selain melakukan serangkaian test atau ujian, untuk bisa mengendalikan atau mengontrol keberlangsungan kegiatan KBM yang nyaman, menyenangkan, efektif dan efisien bagi PDBK, GPK juga melakukan *controlling* dengan sosialisasi ke kelas-kelas inklusi terhadap peserta didik umum (reguler) guna mengingatkan kembali bahwa di kelas atau sekolah yang mereka gunakan belajar tidak hanya ada peserta didik umum tapi juga ada PDBK yang membutuhkan penanganan, pelayanan dan pengertian lebih dari sesamanya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tenggang rasa dan menghindarkan PDBK dari perbuatan *bullying*. Pelaksanaanya satu bulan sekali dengan alokasi waktu yang sudah GPK sesuaikan dengan Guru matapelajaran atau Guru BK.²⁷

²⁷ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

Pihak sekolah melalui GPK juga melakukan kewajiban sekolah untuk membantu memfasilitasi PDBK yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Manajemen Kurikulum di Sekolah Inklusi Di SMP Negeri 3 Krian

Mengenai perencanaan KBM sekolah berbasis inklusi di SMP 3 Krian tidak menyediakan program khusus bagi PDBKnya, kurikulum yang diberikan kepada PDBK juga sama dengan yang digunakan oleh peserta didik reguler yakni kurikulum 2013, namun juga tetap melakukan modifikasi hal ini di dukung oleh pernyataan Pak Adie selaku kepala sekolah yang mengatakan:

“sekolah kita menggunakan kurikulum 2013 dan memang ditunjuk oleh Dinas sebagai sekolah inklusi namun pada praktinya juga kurang mendapatkan dukungan oleh pihak Dinas dalam penanganan terhadap PDBKnya, tidak ada perencanaan khusus untuk PDBK hanya saja dari awal kita menyadari bahwa sekolah juga harus menyesuaikan keadaan PDBK dengan menggunakan kurikulum reguler yang telah di modifikasi”.²⁸

Selain itu pak Nur selaku wakil kepala sekolah dan koordinator kurikulum juga mengatakan:

“tidak banyak ada yang berbeda untuk PDBK, untuk merencanakan pembelajaran untuk PDBK kita melakukan identifikasi atas asesmen atau SK yang dipunya oleh PDBK baik SK dari rumahsakit maupun dari Dinas. Untuk melakukan hal tersebut kami juga meminta pendapat dari Dinas. Selanjutnya

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Adie Selaku Kepala sekolah, Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

SK dari rumahsakit maupun dari Dinas. Untuk melakukan hal tersebut kami juga meminta pendapat dari Dinas. Selanjutnya untuk kurikulum kita modifikasi dengan kurikulum yang digunakan siswa reguler”.²⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bu Dian selaku koordinator guru BK pun juga mengatakan:

“kurikulum sekolah kita pakai K13 sedangkan kurikulum khusus untuk PDBKnya tidak ada mbak, ya mereka (PDBK) belajar bersama dengan peserta didik lainnya, baru kalau ada kendala atau apa gitu baru mereka kita panggil ke ruang BK”.³⁰

Ditanya mengapa menggunakan kurikulum tersebut, Pak Adie selaku kepala sekolah mengutarakan alasannya, yakni:

“selain karna memang tenaga khusus kita terbatas, dan kurangnya perhatian dari pihak Dinas, hambatan yang dialami PDBK tidak seberapa berat jadi dalam penanganannya juga tidak terlalu susah bila berada di kelas inklusi namun pada saat pengajaran juga guru tetap menyesuaikan dan memodifikasi kompetensi dengan kemampuan PDBK”.³¹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pak Nur selaku koor kurikulum, beliau mengatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“iyam mbak karena sebetulnya titik berat tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain. Jadi pihak sekolah selalu mengupayakan agar PDBK merasa aman, nyaman dan senang pada saat berada di kelas inklusi, peserta didik umum pun juga sering dingatkan

²⁹ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30

³⁰ Wawancara dengan Ibu Dian selaku koordinator BK SMP Negeri 3 Krian, Pada Hari Sabtu, 17 September 2016, pukul. 10.30.

³¹ Wawancara Dengan Bapak Adie Selaku Kepala sekolah, Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

oleh Guru untuk bisa mengerti keadaan temennya yang membutuhkan penanganan khusus tersebut.”³²

Selain dengan menentukan dan memodifikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan PDBK sekolah juga merancang 1) Analisis mata pelajaran (AMP), 2) Kalender Akademik, 3) penyusunan Program tahunan (PROTA), 4) penyusunan Program semester (PROMES), 5) Proram satuan pelajaran, dan 6) rencana pengajaran baik bagi PDBK maupun Peserta didik reguler. Dalam hal ini kepala sekolah mengatakan:

“ada dan itu berlaku untuk semua peserta didik untuk bentuk khusus yang memang dirancang untuk PDBK kita tidak ada”³³

Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Pak Nur selaku koordinator kurikulum menyampaikan:

“Untuk pembuatan kalender akademik, analisa matapelajaran (AMP), penyusunan program tahunan (PROTA), penyusunan program semester (PROMES) dan rencana pengajaran pun sama dengan peserta didik lainnya (reguler). Penyusunan program bagi PDBK dengan membuat jadwal pembelajaran khusus bagi PDBK yang dilakukan di kelas khusus untuk bisa tetap memberikan penanganan bagi hambatan yang dimiliki oleh PDBK”.³⁴

Mengenai upaya sekolah dalam mengelola keberhasilan KBM PDBK, Pak Adie selaku kepala sekolah mengungkapkan:

”meskipun kita memiliki keterbatasan dalam hal tenaga khusus yang berkompeten dalam pendidikan khusus , kita tetap

³² Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30.

³³ Wawancara Dengan Bapak Adie Selaku Kepala sekolah, Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

³⁴ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30, Di Ruang Tu.

memaksimalkan tenaga yang ada saya dengan menyediakan tim khusus yang dibantu pak Nur untuk mengordinasi kurikulum PDBK, kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa guru wali kelas yang di kelasnya terdapat PDBK, juga guru BK dalam memberi pemahaman terhadap peserta didik reguler.³⁵

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pak Nur yang mengatakan:

“iya kita bekerja sama dengan guru lainnya, alhamdulillah guru BK dan wali kelas juga banyak membantu dalam menangani PDBK dan kita juga menjalin komunikasi dengan semua peserta didik serta silaturahmi dengan wali murid seintense mungkin.”³⁶

Diperkuat dengan pernyataan Pak Sukiyat selaku wali kelas dan guru matapelajaran kelas VIII yang mengatakan:

“iya karna PDBK tidak bisa dipaksakan ya guru harus menyesuaikan PDBK, kita memahami dan membeikan keringanan di kelas inklusi pada PDBK, kalau ada kendala ya kita bawa mereka (PDBK) ke ruang BK, kalau memang di ruang BK masih sulit teratasi kita langsung menghubungi wali murid, karena kalau tidak malah kasian anaknya nanti.”³⁷

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan, peneliti tidak menemukan kehadiran GPK dalam KBM di sekolah berbasis inklusi di SMP

Negeri 3 Krian, dan kenyataan tersebut pun juga mendapat dukungan dari pernyataan Pak Adie selaku kepala sekolah yang mengatakan:

“disini belum ada GPK tetap mbak hal itu juga sebetulnya disayangkan, karena akan berdampak pada prestasi belajar PDBK. Untuk GPK memang Dinas tidak memberikan, namun

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Adie Selaku Kepala sekolah, Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah, Di Ruang Kepala Sekolah.

³⁶ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30, Di Ruang TU.

³⁷ Wawancara dengan Pak Sukiyat selaku wali kelas dan guru matapelajaran kelas VIII, Sabtu 06 Agustus 2016, pukul. 10.30, Di Rumah.

kita tetap mengupayakan untuk adanya GPK yang memiliki kompetensi dalam bidang disabilitas.”³⁸

Hal itu tersebut juga ditambahkan pernyataannya dengan Pak Nur selaku koordinator siswa inklusi yang mengatakan:

“GPK kita belum maksimal bisa dikatakan tidak ada karena memang jam ajarnya hanya satu minggu sekali pada hari Sabtu, itupun juga belum tentu datang karena GPK yang kita punya statusnya masih Mahasiswa dan seorang Guru di SLB, jadi mereka juga memiliki kesibukan yang membuat jam ajar di SMP 3 Krian ini jadi kurang maksimal.”³⁹

Didukung pula dengan pernyataan Bu Dian selaku koordinator BK.

Beliau mengatakan:

“biasanya hari Sabtu mbak, tapi ndak tau ini kok ndak datang.”⁴⁰

Penempatan KBM bagi PDBK sama dengan peserta didik reguler lainnya, hal itu dibenarkan oleh Pak Sukiyat yang mengatakan:

“tidak ada penempatan khusus hanya saja pemilihan penempatan kelas PDBK terkadang disesuaikan dengan permintaan wali murid dengan alasan tertentu, kadang ya karna ada keluarganya di kelas itu jadi biar PDBK tersebut merasa nyaman dan tenang dikelas jadi ya guru menempatkannya di kelas itu, begitu.”⁴¹

Hal itu juga dibenarkan oleh Pak Nur yang mengatakan:

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Adie Selaku Kepala sekolah, Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah, Di Ruang Kepala Sekolah.

³⁹ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30, Di Ruang Tu.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Dian selaku koordinator BK SMP Negeri 3 Krian, Pada Hari Sabtu, 17 September 2016, pukul. 10.30.

⁴¹ Wawancara dengan Pak Sukiyat selaku wali kelas dan guru matapelajaran kelas VIII, Sabtu 06 Agustus 2016, pukul. 10.30, Di Rumah.

“Titik berat tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain. Jadi pihak sekolah selalu mengupayakan agar PDBK merasa aman, nyaman dan senang pada saat berada di kelas inklusi, peserta didik umum pun juga sering dingatkan oleh Guru untuk bisa mengerti keadaan temennya yang membutuhkan penanganan khusus tersebut”⁴²

Ditanya tentang jumlah PDBK yang ada di SMP Negeri 3 Krian Bu

Dian menjawab:

“PDBK nya ada 4 mbak, 2 dikelas VII dan 2 lagi dikelas VIII. Tahun ajaran baru ini sekolah kita tidak menerima PDBK.”⁴³

Didukung dengan pernyataan Pak Nur, beliau mengatakan:

“tahun ini kelas VII nya tidak ada siswa inklusinya, jadi total keseluruhan jumlah PDBKnya 4 anak, masing-masing hambatannya adalah 3 *slow learner* dan 1 lagi tunarungu”.⁴⁴

Mengenai fasilitas dan sarpras Bu Dian mengatakan:

“selama ini ruang khusus untuk PDBK ya ruang BK ini dan terkadang jika GPK nya datang mereka (PDBK) belajar di ruang perpustakaan, lebih teluasa disana”⁴⁵

Pernyataan Bu Dian tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Pak Nur selaku koordinator inklusi dengan menambahkan referensi lain sekolah inklusi, yang mengatakan:

⁴² Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30. Di Ruang TU.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Dian selaku koordinator BK SMP Negeri 3 Krian, Pada Hari Sabtu, 17 September 2016, pukul. 10.30.

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Sabtu 13 Agustus 2016, pukul. 10.30. Di Ruang TU.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Dian selaku koordinator BK SMP Negeri 3 Krian, Pada Hari Sabtu, 17 September 2016, pukul. 10.30.

“tidak, belum ada ruang sumber bagi PDBK sekolah kita memang masih sangat minim mengenai hal tersebut, di Sidoarjo SMP inklusi yang memiliki fasilitas yang lengkap itu SMP Negeri 4 Sidoarjo, selama ini kita masih menggunakan ruang perpustakaan untuk kelas pembelajaran khusus PDBK pada saat GPKnya datang.”⁴⁶

Mengenai evaluasi KBM PDBK menurut Pak Nur selaku Koordinator inklusi di sekolah sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian, mengatakan:

“Sesuai dengan tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian, ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain,⁴⁷ maka pihak sekolah tidak memberatkan siswa ABK dalam mendapatkan penilaian atau evaluasinya. Namun demikian beberapa bentuk tes, penyusunan butir-butir soal memvalidasi dan menyiapkan jawabannya pihak sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian juga melakukan kerjasama dengan pihak UPTD inklusi kabupaten Sidoarjo.”⁴⁸

Selain melakukan serangkaian test atau ujian, untuk bisa mengendalikan atau mengontrol keberlangsungan kegiatan KBM yang nyaman, menyenangkan, efektif dan efisien bagi PDBK, GPK, guru BK atau Guru reguler/ wali kelas juga melakukan controlling dengan sosialisasi ke kelas-kelas inklusi terhadap peserta didik umum (reguler) guna mengingatkan kembali bahwa di kelas atau sekolah yang mereka gunakan belajar tidak hanya ada peserta didik umum tapi juga ada PDBK yang membutuhkan penanganan, pelayanan dan pengertian lebih dari sesamanya.

⁴⁶ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Sabtu 13 Agustus 2016, pukul. 10.30. Di Ruang TU.

⁴⁷ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30.

⁴⁸ Wawancara dengan Pak Haris selaku TU inklusi SMP Negeri 3 Krian, Sabtu 27 Agustus 2016, pukul. 12.30.

Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tenggang rasa dan menghindarkan PDBK dari perbuatan *bullying*. Biasanya hal ini dilakukan

oleh guru BK atau wali kelas setelah PDBK mengalami masalah di kelas inklusi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bu Ana selaku Wali murid PDBK beliau mengatakan:

“iya semenjak sekolah disini dia nyaman dan mulai bisa mengikuti gaya teman-temannya, bisa lebih sabar dan memiliki rasa tanggung jawab, meskipun terkadang juga mod nya memang suka naik turun. Anak saya mengalami hambatan di pendengaran, memang sengaja memilih sekolah ini karna jaraknya yang tidak terlalu jauh juga dari rumah. Tidak jarang juga ngambek karna salah paham dengan apa yang dibicarakan temennya namun wali kelas dan guru Bknya mencoba terus meminimalisir itu dan walaupun hal itu terjadi juga sekolah langsung mengkomunikasikannya dengan saya baik lewat telepon ataupun dipanggil untuk datang ke sekolah.”

Mengenai Menurut Bu Dian selaku guru BK mengenai tindak lanjut bagi PDBK beliau mengatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Pihak sekolah melalui GPK juga melakukan kewajiban sekolah untuk membantu memfasilitasi PDBK yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Dian selaku koordinator BK SMP Negeri 3 Krian, Pada Hari Sabtu, 17 September 2016, pukul. 10.30.

3. Perbedaan dan Persamaan Manajemen Kurikulum Di Sekolah Inklusi

Antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Perbedaan

- 1) mengenai kurikulum yang digunakan bagi PDBK, Kepala sekolah

SMPN 29 Surabaya mengatakan:

“karna dengan keadaan sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas sebagai sekolah inklusi dengan kebutuhan setiap individu PDBK nya berbeda, maka SMPN 29 menggunakan kurikulum pembelajaran PPI...dst.”

sedangkan Pak Adie selaku kepala sekolah mengatakan bahwa

SMPN 3 Krian:

“tidak ada perencanaan khusus untuk PDBK hanya saja dari awal kita menyadari bahwa sekolah juga harus menyesuaikan keadaan PDBK dengan menggunakan kurikulum reguler yang telah di modifikasi”.⁵⁰

- 2) Dalam hal penyusunan program ajaran SMPN 29 Surabaya melalui

Bu Giyanti sebagai kepala sekolah mengatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 “iya kita juga ada PROTA, kalender akademik, dan RPP untuk peserta didik reguler dan khusus PDBK namun untuk RPP sendiri tidak bersifat wajib bagi setiap GPK menyusunya setiap kali akan memulai KBM berbeda RPP bagi siswa reguler yang merupakan rangkaian SOP bagi guru sebelum mengajar, hanya saja ada dan terlampir.”⁵¹

Lain halnya dengan SMPN 3 Krian melalui wawancara dengan Pak

Nur selaku koordinator kurikulum menyampaikan:

⁵⁰ Wawancara Dengan Bapak Adie Selaku Kepala sekolah, Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

⁵¹ Wawancara Dengan Ibu Giyanti Pada Hari Senin, 15 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

“Untuk pembuatan kalender akademik, analisa matapelajaran (AMP), penyusunan program tahunan (PROTA), penyusunan program semester (PROMES) dan rencana pengajaran pun sama dengan peserta didik lainnya.”⁵²

- 3) Upaya pengelolaan kelas, SMP Negeri 29 Surabaya menyediakan dua program pilihan yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya kelainan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus yakni bagi PDBK tingkat ringan, mengikuti program pendidikan di kelas inklusi sedangkan bagi PDBK tingkat berat mengikuti program pendidikan di kelas khusus. sedangkan SMP Negeri 3 Krian melalui Pak Nur yang mengatakan:

“Titik berat tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain. Jadi pihak sekolah selalu mengupayakan agar PDBK merasa aman, nyaman dan senang pada saat berada di kelas inklusi.”

- 4) Keberadaan fasilitas dan sarpras bagi PDBK, Keberadaan sarpras juga dibenarkan oleh Pak Taufiq selaku Koordinator inklusi SMPN 29 Surabaya yang mengatakan:

“iya alhamdulillah untuk ruang sumber bagi PDBK nya sudah ada dan lengkap dengan alat dan bahan ajar dan alat terapi bagi masing-masing ketunaan.”⁵³

Pernyataan Pak Nur selaku koordinator inklusi SMPN 3 Krian:

“tidak, belum ada ruang sumber bagi PDBK sekolah kita memang masih sangat minim mengenai hal tersebut, di Sidoarjo SMP inklusi yang memiliki fasilitas yang lengkap itu SMP Negeri 4 Sidoarjo, selama ini kita masih

⁵² Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30, Di Ruang Tu

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru

menggunakan ruang perpustakaan untuk kelas pembelajaran khusus PDBK pada saat GPKnya datang.”⁵⁴

5) Dalam hal melakukan evaluasi atau controlling, salah satu GPK dari digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id SMPN 29 Surabaya mengatakan:

“karena kan kalo siswa inklusi tidak ada anak yang tinggal kelas, jadi sudah pasti akan lulus semuanya. Tinggal untuk perencanaan pembuatan kisi-kisi soal ujian atau test memang kita membuatnya dengan bekerja sama dengan GPK-GPK dari 20 sekolah berbasis inklusi di Surabaya atau MGPK untuk sebulan sekali mengadakan pertemuan, dimana pertemuan itu juga selain membahas evaluasi siswa juga membahas tentang perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya dengan mempertimbangkan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK”.⁵⁵

Sedangkan Mengenai evaluasi KBM PDBK menurut Pak Nur selaku Koordinator inklusi di sekolah sekolah berbasis inklusid di SMP Negeri 3 Krian, mengatakan:

“Sesuai dengan tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian, ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain,⁵⁶ maka pihak sekolah tidak memberatkan PDBK dalam mendapatkan penilaian atau evaluasinya. Namun demikian beberapa bentuk tes, penyusunan butir-butir soal memvalidasi dan menyiapkan jawabannya pihak sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian juga melakukan kerjasama dengan pihak UPTD inklusi kabupaten Sidoarjo.”⁵⁷

b. Persamaan

⁵⁴ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Sabtu 13 Agustus 2016, pukul. 10.30. Di Ruang TU.

⁵⁵ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30.

⁵⁷ Wawancara dengan Pak Haris selaku TU inklusi SMP Negeri 3 Krian, Sabtu 27 Agustus 2016, pukul. 12.30.

- 1) Dalam hal identifikasi hambatan dan kebutuhan PDBK. Bu Nella selaku GPK dari SMPN 29 Surabaya mengatakan:

“awal penerimaan peserta didik baru itu GPK mencoba mengidentifikasi PDBK nya melalui asesmen atau SK dari Dinas, kita juga menyediakan form yang harus diisi oleh orang tua wali murid untuk memudahkan kita mengetahui hambatan dan pelayanan khusus sesuai kebutuhan PDBK perindividunya.”⁵⁸

Hal ini sama dengan pernyataan pak Nur selaku wakil kepala sekolah dan koordinator kurikulum SMPN 3 Krian yang mengatakan:

“...untuk merencanakan pembelajaran untuk PDBK kita melakukan identifikasi atas asesmen atau SK yang dipunya oleh PDBK baik SK dari rumahsakit maupun dari Dinas. Untuk melakukan hal tersebut kami juga meminta pendapat dari Dinas.

- 2) Dalam hal pembentukan Tim khusus. Bu Giyanti kepala sekola SMPN 29 Surabaya dalam wawancara mengatakan:

“beberapa tahun yang lalu sebelum masuk ajaran baru, saya lupa tepatnya tahun berapa, sebagai tanggung jawab kita kepada amanah yang diberikan oleh Dinas untuk sekolah kita menjadi sekolah inklusi, kami membentuk Tim Pendidikan Khusus (TPK) secara permanen yang dikoordinatori langsung oleh Pak Taufiq dengan beranggotakan guru pendidikan khusus (GPK) sebanyak 3 orang yang dikirimkan melalui Dinas, yakni Bu Nella, Bu Rachma dan Pak Doni. Tim inilah yang memang memiliki kompetensi dibidang pendidikan inklusi yang akan mengkoordinasikan penyediaan layanan bagi PDBK, dari tahap penerimaan, identifikasi, asesmen, penempatan program hingga pemilihan kurikulum bagi hambatan yang dimiliki oleh setiap PDBK.”⁵⁹

Pak Adie selaku kepala sekolah SMPN 3 Krian mengungkapkan:

⁵⁸ Wawancara Dengan Ibu Nella, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Giyanti Pada Hari Senin, 15 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah.

Pak Adie selaku kepala sekolah SMPN 3 Krian mengungkapkan:

”meskipun kita memiliki keterbatasan dalam hal tenaga khusus yang berkompeten dalam pendidikan khusus, kita tetap memaksimalkan tenaga yang ada saya dengan menyediakan tim khusus yang dibantu pak Nur untuk mengordinasi kurikulum PDBK, kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa guru wali kelas yang di kelasnya terdapat PDBK, juga guru BK.”⁶⁰

- 3) Dalam hal strategi controlling untuk menghindari *bullying*. SMPN 3 Krian dan SMPN 29 Surabaya melakukan controlling dengan sosialisasi ke kelas-kelas inklusi terhadap peserta didik umum (reguler) guna mengingatkan kembali bahwa di kelas atau sekolah yang mereka gunakan belajar tidak hanya ada peserta didik umum tapi juga ada PDBK yang membutuhkan penanganan, pelayanan dan pengertian lebih dari sesamanya.

B. Analisa Data

1. Manajemen Kurikulum di Sekolah Inklusi Di SMP Negeri 29 Surabaya

Sistem pendidikan hendaknya berpusat pada peserta didik, termasuk baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK, artinya kurikulum, administrasi, kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikulumnya, sistem manajemennya harus dirumuskan dan dilaksanakan demi kepentingan peserta didik, bukan demi kepentingan guru, sekolah atau lembaga lain. Program pendidikan inklusi membutuhkan suatu manajemen yang baik agar

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Adie Selaku Kepala sekolah, Pada Hari Kamis, 18 Agustus 2016, Pukul 08.30 di Ruang Kepala Sekolah, Di Ruang Kepala Sekolah.

baik seperti anak reguler pada umumnya. Maka dari itu setiap lembaga pendidikan berupaya sebaik mungkin untuk memajukan dan meningkatkan kualitas manajemen pendidikan itu sendiri. Manajemen ini berfungsi agar segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik secara tersistematis.

Adapun perencanaan (*planning*) manajemen kurikulum baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya nampak dan dimulai dari awal PPDB. Namun khusus untuk PDBK sekolah melakukan identifikasi melalui asesmen yang dimiliki PDBK, baik surat keterangan dari Dinas, rumah sakit serta wawancara dan pengisian angket yang terlampir oleh wali murid untuk mengetahui hambatan apa dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Bu Nella selaku GPK yang mengatakan:

“Iya mbak, jadi pada saat awal penerimaan peserta didik baru itu GPK mencoba mengidentifikasi PDBK nya melalui asesmen atau SK dari Dinas, kita juga menyediakan form yang harus diisi oleh orang tua wali murid untuk memudahkan kita mengetahui hambatan dan pelayanan khusus sesuai kebutuhan PDBK perindividunya, karena sekolah menggunakan Program Pendidikan Individual (PPI)”⁶¹

Hal itu didukung pula oleh Pak Taufiq Selaku koordinator kurikulum inklusi yang mengungkapkan bahwa:

“yaa..kan kalau kita ini pakai PPI mbak, jadi ya menyesuaikan kebutuhan perindividu PDBKnya, dari pihak inklusi dari sekolah melakukan identifikasi dengan asesmen yang dimiliki PDBK sebelum ke proses belajar mengajar yang lebih lanjut, dengan kondisi yang seperti ini juga sekolah harus tetap

⁶¹ Wawancara Dengan Ibu Nella, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

memaksimalkan karena kan memang sudah ditunjuk oleh Dinas sebagai sekolah inklusi”⁶²

Dalam hal ini pada buku pedoman pelaksanaan kurikulum bagi PDBK di sekolah inklusi dikatakan sebagai adaptasi kurikulum, yang merupakan proses penyesuaian kurikulum sekolah reguler dalam implementasiya bagi PDBK di sekolah inklusi sesuai dengan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK. Penyesuaian dimaksud dapat meliputi penyesuaian pada struktur dan muatan kurikulum, proses pembelajaran dan /atau penilaian.⁶³

Dalam pengorganisasian (*Organizing*) Ibu Giyanti selaku kepala sekolah membentuk Tim Pendidikan Khusus (TPK) secara permanen yang dikoordinatori langsung oleh Pak Taufiq dengan beranggotakan guru pendidikan khusus (GPK) sebanyak 3 orang yang dikirimkan melalui Dinas, yakni Bu Nella, Bu Rachma dan Pak Doni. Tim inilah yang memang memiliki kompetensi dibidang pendidikan inklusi yang akan mengkoordinasikan penyediaan layanan baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK, dari tahap penerimaan, identifikasi, asesmen, penempatan program hingga pemilihan kurikulum bagi hambatan yang dimiliki oleh setiap PDBK.

Dan didukung pula oleh pernyataan Ibu Nella selaku GPK yang juga menambahkan peran serta, bentuk kerjasama dan pembagian tugas

⁶² Wawancara Dengan Bapak Taufiq, Pada Hari Rabu, 10 Agustus Pukul 10.00 di Ruang Guru.

⁶³ Abdul Salim, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, *Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusi Berbasis Kebutuhan Individu*. (Vol 16: Edisi Khusus I, Juni 2010), 9.

antar GPK yang ada di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya, yang mengatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 “Iya, disini GPKnya 3 orang, sebetulnya dari Dinas ada 4 orang tapi yang satu kemarin baru saja pindah karena baru saja menikah dan ikut suaminya, jadi tinggal saya, Bu Dwi dan Pak Doni GPKnya. Cukup kerepotan sih karna Cuma bertiga karena PDBKnya 55 anak tahun ini jadi perbandingan antara GPK dengan PDBKnya 1:19, dan Dinas belum merspon mengenai kurangnya tenaga GPK, jadi ya kita saling menyadari dan saling membantu dan membagi tugas saja Bu Dwi memegang siswa inklusi kelas VII, Pak Doni kelas VIII dan Saya kelas XI”.⁶⁴

Menanggapi hal tersebut, memang Kemendikbud RI pada pedoman pelaksanaan kurikulum bagi PDBK di sekolah berbasis inklusi menuliskan bahwa jumlah GPK yang wajib disediakan sekolah inklusi yang menyelenggarakan Kelas Khusus, menggunakan rasio GPK:PDBK = 1 : 5⁶⁵, artinya 1 GPK maksimal untuk melayani 5 PDBK di Kelas Khusus. Jadi pernyataan Bu Nella bisa dibenarkan dan semoga pelaporan kepada Dinas bisa segera menampakkan hasilnya guna menambah jumlah GPK di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya.

Selanjutnya mengenai penempatan kelas PDBK Bu Nella selaku GPK yang mengatakan:

“setelah tau hambatan pada PDBK kita juga menentukan penempatan kelasnya, ini juga dilakukan berdasarkan karakter yang dimiliki siswa reguler dan PDBK yang disesuaikan, Semaksimal mungkin PDBK yang tingkat ringan harus mau belajar di kelas inklusi dengan peserta didik reguler. Tapi juga ada PDBK yang tingkat hambatannya berat sehingga dari pagi

⁶⁴ Wawancara Dengan Ibu Nella, Pada Hari Senin, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

⁶⁵ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi, (Kemendikbud RI: Jakarta, 2014), 47.

atau awal jam pelajaran PDBK dengan hambatan yang berat itu kita langsung tempatkan di kelas khusus atau yang biasa warga SMP Negeri 29 ini “Ruang Pintar”.⁶⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum bagi PDBK di

sekolah berbasis inklusi yang telah ditentukan oleh Kemendikbud RI, sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya dalam hal tersebut menyediakan dua program pilihan yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya kelainan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus yakni bagi PDBK tingkat ringan, mengikuti program pendidikan di kelas inklusi sedangkan bagi PDBK tingkat berat mengikuti program pendidikan di kelas khusus. Untuk menentukan hal tersebut pada saat awal penerimaan PDBK sekolah melakukan identifikasi melalui asesmen yang dimiliki PDBK, baik surat keterangan dari Dinas, Rumah sakit serta wawancara dan pengisian angket yang terlampir oleh wali murid.

Menurut peneliti pembentukan program sesuai dengan pedoman kurikulum 2013 bagi PDBK di sekolah inklusi yang direalisasikan oleh

SMP Negeri 29 ini sudah cukup baik dan menjadikan sekolah ini layak sebagai sekolah inklusi rujukan di wilayah Surabaya.

Pelaksanaan (*actuating*) Pada tahap ini merupakan tahap yang paling menentukan apakah perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi dibawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah

⁶⁶ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

atau tidak.⁶⁷ Setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian dan wawancara di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya

mengenai pelaksanaan manajemen kurikulum baik bagi peserta didik

reguler maupun bagi PDBK Bu Nella selaku GPK mengatakan:

“Disini (SMP Negeri 29 Surabaya) menggunakan PPI mbak, program pembelajaran individual dan modifikasi, setelah tau kebutuhan anaknya lewat asesmen tadi kita tetap menyesuaikan kebutuhan PDBK akan hambatan dan ketunaanya. Untuk RPP nya ada tapi kita tidak buat setiap hari atau setiap mau mengajar tidak, karna waktu dan tenaga kita juga terbatas, kalau kita difokuskan membuat itunya nanti malah kasian PDBKnya nanti penangannya jadi kurang”.⁶⁸

Selain itu Bu Dwi selaku GPK mengatakan hal yang sama dengan menambahkan jadwal pembelajaran kelas bagi PDBK:

“iya kalau kita tetap menyesuaikan kebutuhan anak, lihat kondisi anak juga karna setiap saat kondisi PDBK bisa berubah baik secara mental dan emosinya. Kalaupun kita rencanakan diawal juga nanti pasti akan berbeda pasa saat implementasinya. Namun kita tetap menjadwalkan PDBK untuk melakukan pembelajaran khusus di “ruang pintar” dengan mengklasifikasikan ketunaannya yang itu pun juga terkadang tidak berjalan sesuai dengan jadwal, pintar-pintar GPKnya aja menyesuaikan dengan keadaan PDBK pada saat itu, jika tidak memerlukan penangan khusus ya kita tetap biarkan dia belajar di kelas reguler atau inklusi bareng dengan yang lain (umum)”.⁶⁹

Hal tersebut memang dikatakan oleh Kemendikbud RI melalui panduan sekolah berbasis inklusi yakni prgram pembelajaran bagi PDBK harus disesuaikan dengan kemampuan dasar yang terkait dengan aspek

⁶⁷ Nur, Muhammad. 2001. *Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual*, Makalah tidak diterbitkan.

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

⁶⁹ Wawancara Dengan Ibu Dwi Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 10 Agustus 2016, Pukul 10.30 di Ruang BK.

potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK agar dapat menjalankan fungsi kehidupan secara optimal.⁷⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tahun ajaran 2015/2016 tercatat jumlah peserta didik di sekolah inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya sebanyak 1254 orang dan 55 diantaranya adalah PDBK. Salah satu keistimewaan sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya ini adalah usianya yang paling tua sebagai sekolah inklusi yang telah ditunjuk oleh Dinas, dan ketunaan PDBKnya pun paling berat dan beragam. Meski demikian agar proses kegiatan belajar mengajar (PKBM) siswa inklusi bisa berjalan dengan efektif dan efisien sekolah berusaha memaksimalkan fasilitasnya yang lengkap, karena manajemen yang baik tidak terlepas juga oleh sarana prasana, dalam sekolah inklusi terutama ruang sumber atau “ruang pintar” yang juga sebagai kelas khusus bagi PDBK. hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Nella selaku GPK yang mengatakan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“cukup lengkap fasilitas yang menunjang pelaksanaan pembelajaran untuk PDBK, ini saja sekarang ruang pintar atau kelas khususnya sedang direnovasi jadi untuk sementara waktu ruang khusus kita gabung dengan ruang BK, hehehe.. ketunaan yang kita punyai beragam, untuk yang paing berat ya yang hambatannya double atau majemuk, saat ini yang seperti itu ada gabungan dari tunagrahita dan *low vision*. Untuk PDBK yang seperti ini dari pagi kita sudah panggil untuk keruang khusus untuk dapat pelayanan dan terapi diruang khusus. Untuk alat mungkin kita sedikit kurang mengenai jumlah kursi roda, karna sudah banyak yang terpakai, jadi beberapa dari PDBK ada yang membawa kursi roda sendiri dari rumah”.⁷¹

⁷⁰ Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi, (Kemendikbud RI: Jakarta, 2014), 45.

⁷¹ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

Jadwal pendampingan siswa berkebutuhan khusus di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya, diharapkan dapat membantu terlaksanannya PKBM dengan efektif dan efisien sehingga PDBK mampu berkembang dan mendapatkan hasil yang sesuai dan diharapkan. Keberadaan ruang pintar dan sarana prasarana yang lengkap harus digunakan sebagai tempat pembelajaran individual dan bukan sebagai ruang untuk menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus sepanjang waktu.

Meskipun proses belajar mengajar pada PDBK tidak bisa dipaksakan dengan memberikan materi-materi kepada mereka tetapi justru menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, sekolah tetap menanamkan dan membina membentuk karakter PDBK agar juga bisa disiplin sengan tidak terlalu memanjakan PDBK tentu dengan porsinya, hal demikian juga bertujuan untuk membentuk secara perlahan karakter PDBK.

Sistem evaluasi (*evaluation/controlling*) Analisa mengenai evaluasi juga didapatkan melalui wawancara dengan salah satu GPK yang mengatakan:

“karena kan kalau siswa inklusi tidak ada anak yang tinggal kelas, jadi sudah pasti akan lulus semuanya. Tinggal untuk perencanaan pembuatan kisi-kisi soal ujian atau test memang kita membuatnya dengan bekerja sama dengan GPK-GPK dari 20 sekolah berbasis inklusif di Surabaya atau MGPK untuk sebulan sekali mengadakan pertemuan, dimana pertemuan itu juga selain membahas evaluasi siswa juga membahas tentang perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya dengan mempertimbangkan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus PDBK”.⁷²

⁷² Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

Mengenai data penilaian perkembangan PDBK sekolah juga mempunyai form-form yang isinya merupakan deskripsi perkembangan siswa setiap minggunya, yang selanjutnya satu bulan sekali akan dilaporkan melalui rekapan kepada sekolah. Penilaian hasil belajar PDBK dapat dilakukan bersamaan dengan peserta didik pada umumnya atau tempat lain sesuai kebutuhan PDBK. Misalnya, dikelas tidak tersedia komputer padahal peserta didik membutuhkannya untuk pelaksanaan ujian. Ujian dapat dilaksanakan di tempat dimana peralatan komputer tersedia. Buku laporan hasil belajar PDBK mengikuti cara dan ketentuan umum dan perlu ditambahkan pada rapor PDBK tentang informasi hasil belajar secara naratif-deskriptif, terutama pada materi/kompetensi yang mengalami modifikasi.

Selain melakukan serangkaian test atau ujian, untuk bisa mengendalikan atau mengontrol keberlangsungan kegiatan KBM yang nyaman, menyenangkan, efektif dan efisien bagi PDBK, GPK juga melakukan *controlling* dengan sosialisasi ke kelas-kelas inklusi terhadap peserta didik umum (reguler) guna mengingatkan kembali bahwa di kelas atau sekolah yang mereka gunakan belajar tidak hanya ada peserta didik umum tapi juga ada PDBK yang membutuhkan penanganan, pelayanan dan pengertian lebih dari sesamanya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tenggang rasa dan menghindarkan PDBK dari perbuatan *bullying*.

Pelaksanaanya satu bulan sekali dengan alokasi waktu yang sudah GPK sesuaikan dengan Guru matapelajaran atau Guru BK.⁷³

Pihak sekolah melalui GPK juga melakukan kewajiban sekolah untuk membantu memfasilitasi PDBK yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Manajemen Kurikulum di Sekolah Inklusi Di SMP Negeri 3 Krian

Sistem pendidikan hendaknya berpusat pada peserta didik, baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK, artinya kurikulum, administrasi, kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikulumnya, sistem manajemennya harus dirumuskan dan dilaksanakan demi kepentingan peserta didik, bukan demi kepentingan guru, sekolah atau lembaga lain.

Program pendidikan inklusi membutuhkan suatu manajemen yang baik agar anak berkebutuhan khusus dapat menjalankan pendidikan yang layak dan baik seperti anak reguler pada umumnya. Maka dari itu setiap lembaga pendidikan berupaya sebaik mungkin untuk memajukan dan meningkatkan kualitas manajemen pendidikan itu sendiri. Manajemen ini berfungsi agar segala pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik secara tersistematis.

Adapun perencanaan (*planning*) manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian ini tidak jauh berbeda dengan

⁷³ Wawancara Dengan Ibu Nella Selaku GPK, Pada Hari Rabu, 17 Agustus 2016, Pukul 09.30 di Ruang Pintar.

Adapun perencanaan (*planning*) manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian ini tidak jauh berbeda dengan

program sekolah reguler. Pada tahap ini dikatakan oleh Pak Nur selaku

koordinator inklusi mengatakan:

“tidak banyak ada yang berbeda untuk PDBK, untuk merencanakan pembelajaran untuk PDBK kita melakukan identifikasi atas asesmen atau SK yang dipunya oleh PDBK baik SK rumahsakit maupun dari Dinas. Untuk melakukan hal tersebut kami juga meminta pendapat dari Dinas. Untuk pembuatan kalender akademik, analisa matapelajaran (AMP), penyusunan program tahunan (PROTA), penyusunan program semester (PROMES) dan rencana pengajaran pun sama dengan peserta didik lainnya. Penyusunan program bagi PDBK dengan membuat jadwal pembelajaran khusus bagi PDBK yang dilakukan di kelas khusus untuk bisa tetap memberikan penanganan bagi hambatan yang dimiliki oleh PDBK”.⁷⁴

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Pak Adie selaku kepala sekolah yang mengatakan:

“sekolah kita memang ditunjuk oleh Dinas sebagai sekolah inklusi namun pada praktinya juga kurang mendapatkan dukungan oleh pihak Dinas, tidak ada perencanaan khusus untuk PDBK hanya saja dari awal kita menyadari bahwa sekolah juga harus menyesuaikan keadaan PDBK, sekolah juga mengupayakan untuk adanya GPK yang memiliki kompetensi dalam bidang dissabilitas.”

Perencanaan kurikulum, baik pelayanan ataupun pelayanan khusus yang diberikan kepada PDBK berdasarkan assesmen atau riwayat ketunaan yang dimiliki PDBK itu sendiri yang telah disetujui oleh Dinas dan

⁷⁴ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30

kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan, hambatan dan potensi yang dimiliki PDBK.⁷⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Pengorganisasian (*organizing*) Pak Adie selaku kepala sekolah

menugaskan pak Nur sebagai koordinator kurikulum inklusi yang selanjutnya bekerjasama dengan Guru umum/matapelajaran, GPK, dan Psikolog atau Guru bimbingan konseling untuk mengelola berlangsungnya pendidikan inklusi di SMP Negeri 3 Krian.

Pada tahun ajaran 2016-2017 sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian memiliki PDBK sebanyak 4 anak. 2 anak di kelas VIII dan 2 lagi di kelas IX. Bu Dian selaku guru bimbingan konseling (BK) dengan menambahkan penanganan terhadap PDBK, mengatakan:

“iya PDBK nya 4 orang kalau ada apa-apa ya mereka langsung kami panggil ke ruang BK, kadang seminggu sekali hari Sabtu belajar sama GPK di kelas sebelah (perpustakaan), tapi GPK nya belum tentu pasti sabtu bisa datang karna sifatnya bukan permanen”.⁷⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pelaksanaan (*actuating*) Pak Nur selaku koordinator kurikulum inklusi mengatakan:

“Titik berat tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain. Jadi pihak sekolah selalu mengupayakan agar PDBK merasa aman, nyaman dan senang pada saat berada di kelas inklusi, peserta didik umum pun juga

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Dian selaku koordinator BK SMP Negeri 3 Krian, Pada Hari Sabtu, 17 September 2016, pukul. 10.30.

sering dingatkan oleh Guru untuk bisa mengerti keadaan temennya yang membutuhkan penanganan khusus tersebut”⁷⁷

Karena memang tidak ada pengajaran khusus bagi PDBK selain hari sabtu maka PDBK banyak melakukan KBM di kelas inklusi bersama dengan peserta didik reguler (umum). PDBK mengikuti pelajaran di kelas dan menerima pelajaran yang sama dengan siswa umum, hanya pada beberapa materi atau kompetensi Guru matapelajaran/guru kelas juga mengganti materi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas PDBK tidak jarang juga PDBK mendapatkan tugas atau PR yang sama dengan peserta didik lainnya.

Guru kelas atau wali kelas di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian nampak cenderung memiliki ikatan emosional lebih tinggi kepada PDBK yang ada di dalam kelasnya dibandingkan dengan GPK hal ini disebabkan tingkat intensitas PDBK yang lebih banyak menghabiskan KBMnya bersama-sama di kelas inklusi dan hal ini menjadi dampak positif tersendiri bagi PDBK, yang merupakan bentuk dari keberhasilan tujuan sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian yang ingin mensosialisasikan PDBK dengan anak normal lain sebayanya anpa memberikan skat.⁷⁸

Evaluasi (*evaluation*) menurut Pak Nur selaku Koordinator inklusi di sekolah sekolah berbasis inklusid di SMP Negeri 3 Krian, mengatakan:

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30.

⁷⁸ Wawancara dengan Bu Ana selaku wali murid PDBK kelas VII di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30.

Sesuai dengan tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian, ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain,⁷⁹ maka pihak sekolah tidak memberatkan siswa ABK dalam mendapatkan penilaian atau evaluasinya. Namun demikian beberapa bentuk tes, penyusunan butir-butir soal memvalidasi dan menyiapkan jawabannya pihak sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian juga melakukan kerjasama dengan pihak UPTD inklusi kabupaten Sidoarjo.⁸⁰

Selain melakukan serangkaian test atau ujian, untuk bisa mengendalikan atau mengontrol keberlangsungan kegiatan KBM yang nyaman, menyenangkan, efektif dan efisien bagi PDBK, GPK, guru BK atau Guru reguler/ wali kelas juga melakukan controlling dengan sosialisasi ke kelas-kelas inklusi terhadap peserta didik umum (reguler) guna mengingatkan kembali bahwa di kelas atau sekolah yang mereka gunakan belajar tidak hanya ada peserta didik umum tapi juga ada PDBK yang membutuhkan penanganan, pelayanan dan pengertian lebih dari sesamanya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tenggang rasa dan menghindarkan PDBK dari perbuatan *bullying*. Biasanya hal ini dilakukan oleh guru BK atau wali kelas setelah PDBK mengalami masalah di kelas inklusi.

⁷⁹ Wawancara dengan Pak Nur selaku Wakasek dan koor kurikulum inklusi SMP Negeri 3 Krian, Kamis 04 Agustus 2016, pukul. 10.30.

⁸⁰ Wawancara dengan Pak Haris selaku TU inklusi SMP Negeri 3 Krian, Sabtu 27 Agustus 2016, pukul. 12.30.

3. Perbedaan dan Persamaan Manajemen Kurikulum Di Sekolah Inklusi

Antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian

a. Perbedaan:

1) Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, hal yang berbeda pada manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dengan SMP Negeri 3 Krian adalah dari segi penyusunan Analisa Mata Pelajaran (AMP), penyusunan program tahunan (PROTA), penyusunan program semester (PROMES) dan rencana pengajaran (RPP) bagi PDBK. Di sekolah berbasis inklusi di SMP negeri 29 Surabaya penyusunanya disesuaikan dengan keadaan peserta didik artinya antara terdapat dua model program penyusunan. Yang pertama untuk peserta didik reguler dan yang kedua untuk PDBK.

Sedangkan di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian penyusunan program perencanaanya sama, antara peserta didik reguler (umum) dengan PDBK.

2) Pengorganisasian

Letak perbedaan dalam hal pengorganisasian antara sekolah berbasis inklusid di SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian meliputi letak penempatan dan program kelas untuk PDBK serta tenaga pendidikanya. Di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri

2) Pengorganisasian

Letak perbedaan dalam hal pengorganisasian antara sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian meliputi letak penempatan dan program kelas untuk PDBK serta tenaga pendidikanya. Di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya PDBK berhak atas dua program kelas yakni program kelas inklusi untuk PDBK yang memiliki hambatan ringan dan program kelas khusus untuk PDBK yang memiliki hambatan berat. Dimana dalam penangan terhadap PPDBK SMP Negeri 29 Surabaya kepala sekolah melakukan kerja sama dengan membentuk tim khusus yang anggota merupakan tenaga-tenaga/ GPK yang memang memiliki kompetensi dalam bidang disabilitas. Ketersediaan GPK di sekolah ini juga merupakan bentuk peran serta Dinas dalam proses KBM di sekolah berbasis inklusi.

Berbeda halnya dengan sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian dimana PDBK banyak melakukan bahkan bisa dikatakan 95% melakukan KBM di kelas inklusi bersama dengan peserta didik reguler lainnya. GPK yang ada di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian pun tidak setiap hari berada di sekolah melainkan satu minggu sekali, hal ini disebabkan GPK yang ditunjuk oleh sekolah masih berstatus sebagai mahasiswa dan juga merupakan salah satu Guru di SLB sehingga waktu yang dimiliki untuk SMP negeri 3 Krian pun juga terbatas. Namun demikian pihak sekolah tidak lantas

menerima keadaan dengan hal tersebut dalam melayani PDBK, warga sekolah tetap memiliki etos kerja yang tinggi dengan melakukan kerja sama yang baik antara guru wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK dan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan wali murid PDBK agar keberlangsungan KBM kelas inklusi tetap bisa berjalan dengan efektif, efisien, nyaman dan menyenangkan bagi PDBK.

3) Pelaksanaan

Tidak banyak perbedaan mengenai pelaksanaan dan tidak terlepas tahap perencanaan dan pengorganisasian yang ada sebelumnya. Meskipun memiliki akreditasi yang sama namun jumlah PDBK antara sekolah ini memiliki selisih yang cukup banyak dimana 55 PDBK di SMP Negeri 29 Surabaya sedangkan 4 PDBK di SMP Negeri 3 Krian, tidak dipungkiri hal ini juga dapat menyebabkan perbedaan mengenai pelaksanaan proses KBM di sekolah berbasis inklusi tersebut. turut mempengaruhi, pada dasarnya sekolah yang menyediakan program inklusi memang harus mampu menyesuaikan dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik reguler maupun PDBK. hanya saja KBM untuk PDBK di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya nampak perbedaan program kelas, karena memang tersedia dua program kelas sesuai dengan kurikulum 2013 pedoman pelaksanaan kurikulum bagi PDBK di sekolah inklusi, dan terdapat ruang sumber atau ruang khusus yang biasa disebut ruang pintar sebagai program pembelajaran khusus dengan ketersediaan

GPK tetap didalamnya. Kelengkapan fasilitas maupun sarana prasarana yang ada pada sekolah ini juga disebabkan kompleksnya

jenis hambatan yang ada pada PDBK.

Mengingat jumlah PDBK dan jenis hambatan yang ada di sekolah berbasis inklusi di SMP negeri 3 Krian tidak terlalu banyak dan berat, maka KBM banyak dilakukan di kelas inklusi, PDBK dapat selalu belajar dan membaaur dengan peserta didik reguler lainnya. Hanya saja dalam penanganannya sekolah lebih memaksimalkan tenaga yang ada dengan melakukan kerja sama yang baik antara guru matapelajaran, guru kelas dan guru BK serta jalinan komunikasi yang baik dengan orangtuawali murid PDBK, hal ini nampak dengan kurangnya peran serta GPK yang memiliki penguasaan kompeten yang ada pada bidangnya. Pembelajaran khusus dengan GPK di SMP Negeri 3 Krian dilakukan satu minggu sekali setiap hari Sabtu di ruang perpustakaan.

4) Evaluasi

Setelah penulis menganalisa, perbedaan dalam hal evaluasi antara sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya dengan SMP Negeri 3 Krian adalah jika di SMP Negeri 29 Surabaya penilaian oleh GPK dilakukan pada form penilaian dengan setiap bulan direkap lalu hasilnya dilaporkan kepada pihak sekolah, berbeda dengan SMP Negeri 3 Krian penilaian untuk PDBK tidak jauh berbeda dengan

peserta didik lainnya, tidak ada form khusus untuk PDBK hanya saja guru yang menilai sudah memberi nilai maklum untuk PDBK.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Begitu juga dalam hal pembuatan soal atau kisi-kisi soal ujian, SMP Negeri 29 melakukannya dengan melakukan kerja sama dengan MGPK dari 20 sekolah berbasis inklusi di Surabaya, sedangkan SMP Negeri 3 Krian bekerja sama dengan UPTD Inklusi kabupaten Sidoarjo.

b. Persamaan

1) Perencanaan

Dalam tahap ini antara sekolah berbasis inklusi di sekolah SMP Negeri 29 Surabaya dengan SMP Negeri 3 Krian adalah dalam hal penerimaan peserta didik baru atau yang sering disingkat dengan sebutan PPDB, dimana sekolah sama-sama melakukan identifikasi terhadap PDBK melalui asesmen yang dimiliki PDBK, baik surat keterangan dari Dinas, rumah sakit serta wawancara dan pengisian angket yang terlampir oleh wali murid untuk mengetahui hambatan apa dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan PDBK.

2) Pengorganisasian

Kesamaan dalam hal ini nampak pada kebijakan kepala sekolah dalam membuat tim khusus untuk penanganan PDBK demi terselenggaranya KBM yang nyaman, aman, menyenangkan, efektif dan efisien baik bagi peserta didik reguler maupun PDBK.

3) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kurikulum bagi peserta didik reguler antara kedua sekolah inklusi yang sama-sama memiliki akreditasi A ini menggunakan kurikulum 2013.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari studi perbandingan manajemen kurikulum di sekolah inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK dimulai dengan perencanaan pada saat kegiatan PPDB. Bagi PDBK ditambah dengan melakukan identifikasi melalui asesmen yang dimiliki PDBK untuk selanjutnya dapat merumuskan penyusunan 1). Analisis mata pelajaran (AMP), 2). Kalender Akademik, 3). Penyusunan Program Tahunan (PROTA), 4) Penyusunan Program Semester (PROMES), 5). Proram Satuan Pelajaran, dan 6). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam pengelolaannya terhadap keberhasilan KBM baik bagi bagi peserta didik reguler maupun PDBK sekolah membentuk Tim Khusus yang beranggotakan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi PLB yang selanjutnya akan mengkoordinir segala kegiatan KBM pada PDBK. Pelaksanaan KBM di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 29 Surabaya baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK menggunakan kurikulum 2013 yang merujuk pada pedoman pelaksanaan kurikulum bagi PDBK di sekolah inklusi yang dibuat oleh Kemendikbud RI, dengan

tersedianya dua pilihan program kelas yang disesuaikan dengan berat ringannya kelainan yang dialami PDBK, yakni bagi PDBK tingkat ringan, mengikuti program pendidikan kelas inklusi, sedangkan bagi PDBK tingkat berat mengikuti program pendidikan di kelas khusus atau di “ruang pintar”. Sekolah juga melakukan modifikasi kurikulum dengan menggunakan pendekatan program pendekatan individual (PPI). Untuk mengevaluasi atau mengontrol terselenggaranya KBM yang baik dan efisien baik Guru umum dan GPK menyusun form penilaian yang setiap satu bulan sekali dan direkap hasilnya dalam bentuk deskripsi yang kemudian diserahkan ke sekolah.

2. Manajemen kurikulum baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian dimulai dengan perencanaan pada saat kegiatan PPDB bagi peserta didik reguler, bagi PDBK dengan ditambah melakukan identifikasi melalui asesmen yang dimiliki PDBK untuk selanjutnya dapat merumuskan penyusunan 1). Analisis mata pelajaran (AMP), 2). Kalender Akademik, 3). Penyusunan Program Tahunan (PROTA), 4). Penyusunan Program Semester (PROMES), 5). Program Satuan Pelajaran, dan 6). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam mengelola proses KBM baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK kepala sekolah mampu menciptakan suasana sekolah yang harmonis sehingga tercipta kerja sama yang baik antara guru wali kelas, guru BK, GPK dan peserta didik reguler untuk membuat PDBK juga tetap merasa nyaman. Pelaksanaan KBM di sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian menggunakan kurikulum 2013 baik bagi peserta didik

reguler maupun bagi PDBK, hanya saja pada PDBK sekolah melakukan beberapa modifikasi, meskipun dalam praktiknya PDBK banyak menghabiskan waktu belajarnya dikelas inklusi bersamaan dengan peserta didik reguler lainnya. Titik berat tujuan sekolah berbasis inklusi di SMPN 3 Krian ini adalah agar siswa berkebutuhan khusus mampu bersosialisasi dengan siswa didik reguler yang lain. Pihak sekolah melakukan evaluasi selain dengan berkerja sama dengan guru mata pelajaran atau guru wali kelas, juga bekerja sama dengan UPTD inklusi kabupaten Sidoarjo untuk evaluasi terhadap KBM bagi PDBK.

3. Terdapat perbedaan dan persamaan akan manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi antara SMP Negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian. Perbedaan tersebut terlihat dari pelaksanaan kurikulum 2013 bagi PDBK di sekolah inklusi. Dimana pada SMP Negeri 29 Surabaya tersedia dua pilihan program pendidikan kelas yang disesuaikan dengan tingkat berat ringannya kelainan yang dialami PDBK. Sedangkan Sekolah berbasis inklusi di SMP Negeri 3 Krian hanya tersedia program pendidikan di kelas inklusi dimana setiap kali pembelajarannya PDBK selalu berada sama dengan peserta didik reguler lainnya. Namun demikian antara dua sekolah berbasis inklusi ini juga memiliki kesamaan dalam hal manajemen kurikulumnya dimana untuk menentukan penanganan terhadap PDBK sekolah menggunakan pendekatan kurikulum PPI dan modifikasi. Sama dalam tahap manajemen kurikulumnya bagi peserta didik reguler yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi. Serta memiliki kesamaan dalam penggunaan kurikulum bagi peserta didik regulernya yakni kurikulum 2013.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-Saran

Akhirnya dari penulisan skripsi ini penulis mengajukan beberapa saran sebagai alternatif dalam memajemen kurikulum baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK di sekolah berbasis inklusi. Saran yang diajukan disini didasarkan pada beberapa masukan dari sebagian responden sebagai tanggapan terhadap manajemen kurikulum di sekolah berbasis inklusi antara SMP negeri 29 Surabaya dan SMP Negeri 3 Krian, saran-saran itu antara lain :

1. Pengembangan inovasi terhadap kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah inklusi. Hal ini sangat dibutuhkan sebab pada sekolah inklusi memiliki kemajemukan peserta didik yang tentunya diharapkan keberhasilan prestasi antara peserta didik reguler maupun PDBK tetap terjaga dengan baik dan sesuai dengan keadaan peserta didik, serta dapat menciptakan suasana belajar di sekolah yang aman, tenang, dan menyenangkan baik bagi peserta didik reguler maupun PDBK.
2. Penyediaan guru pendidik khusus (GPK) yang sesuai dengan kapasitas PDBK, baik dalam hal kualitas ataupun kuantitasnya, hal ini mempunyai peran penting terhadap keberhasilan proses KBM khususnya di sekolah berbasis inklusi baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK. Disamping itu dengan adanya GPK yang memadai dan memiliki kualifikasi

serta kompetensi pendidikan khusus (PLB) tidak hanya dapat menentukan keberhasilan PDBK untuk mencapai indikator-indikator materi maupun kurikulum yang sesuai dengan hambatan atau ketunaan yang dialami PDBK.

3. Penyediaan sarana prasarana yang dapat menunjang proses KBM baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK, tersedianya ruang sumber khusus bagi PDBK yang memiliki kelengkapan fasilitas bahan dan alat ajar bagi masing-masing ketunaan yang dimiliki PDBK.
4. Sekolah perlu memberi perhatian lebih terhadap pemahaman keadaan sekolah inklusi kepada peserta didik reguler mengenai keberadaan PDBK di lingkungan sekolah agar dapat terjalin kerja sama yang baik pula bagi keberhasilan prestasi baik bagi peserta didik reguler maupun bagi PDBK di sekolah inklusi.
5. Dinas memberikan perhatian lebih dan melakukan peninjauan ulang mengenai keadaan sekolah setelah ditunjuk sebagai sekolah berbasis inklusi yang berada di daerah tersebut, dengan tidak sepenuhnya membebankan kepada pihak sekolah. Agar PDBK dan GPK juga turut merasakan keadilan dalam melakukan KBM yang layak efektif, efisien, aman, nyaman dan menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salim, Munawir Yusuf. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif*. Surakarta: FKIP Universitas 11 Maret. 2009.
- Abdullah. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar. Ruzz Media. 2007.
- Abu ahmadi. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka cipta. 1991.
- Bandi, Delphie. *Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus Suatu Pengantar Dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- Cahaya, S laila. *Buku Anak Untuk ABK*. Yogyakarta: Candra. 2015.
- Cholid Narbuko dan Ahmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Dedn J. *Managing the Primari School, Second Edition*. London Knowledge. 2003.
- Depdikbud. Kurikulum SD, SMP, SMA, Kejuruan 1975, 1984, 1994. Jakarta: Depdikbud
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Rajawali Press. 1994.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Hamalik. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Hodgkinson, Bill. *Curriculum in the Classroom*. Queensland: Distance Education Centre. 1990.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/10122/9/bab%202.pdf>, *Mengenal Pendidikan Inklusi*, (www.ditplb.or.id)
- <http://K3311020.blogspot.co.id/2013/05/makalah-manajemen-kurikulum.html?m=1>
<http://kiswankurikulum.blogspot.com/.ManajemenKurikulum>.
- Ilahi, Mohammad Takdir. *Pendidikan Inklusif*. Papringan: Ar-Ruzz Media. 2012.
Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi. Papringan : AR-Ruzz Media. 2012.

- Ilahi, Mohammad Takdir. *Pendidikan Inklusif*. Papringan: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Imam Suprayogo. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Johnson, BH & Skjorten, D Miriam. *Pendidikan Kebutuhan Khusus, sebuah Pengantar*. Bandung: Program Pascasarjana UPI. 2003.
- Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan, Vol 16, Edisi khusus I: *Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan Individu Peserta Didik*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional. 2010.
- Lexy J. Meleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999.
- Made Pidarta. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta. 1998.
- Maman Ukas. *Manajemen: Konsep, Prinsip, dan aplikasi*. Bandung: Ossa Promo. 1999.
- Manab, Abdul. *Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah*. Jakarta: Kalimedia. 2013.
- MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmim. *Memahami dan Membantu Anak ADHD*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- Moh. Nasir. *Metoda Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Muhammad, Hamid. *Kurikulum 2013 (Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif*. Jakarta: Kemendikbud RI. 2014.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Neong Muhajir. *Metodelogi Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesrasin. 1998.
- Nur, Muhammad. *Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual*, Makalah tidak diterbitkan. 2001.
- Oemar. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70, Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sanapiah Faisol. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.

Smith, J David. *Sekolah Inklusi*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2006.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Sujana, Nana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru. 1991.

Sukardi. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1997.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1997.

Sukmadinata, Nana. *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Refika Aditama. 2012.

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380 /C.66/MN/2003 Perihal Pendidikan Inklusif. , 20 Januari 2003

Tritonegoro, Sutratinah. *Anak Supernormal dan Program Pendidikannya*. Yogyakarta: Bumi Aksara. 1984.

Yusuf, Munawir. *Implementasi pendidikan inklusif melalui adaptasi kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung : Asa sejahtera. 2002.